

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN PENGHULU DALAM MEMBINA LEMBAGA
KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA DI
KEPENGHULUAN PEKAITAN KECAMATAN PEKAITAN KABUPATEN
ROKAN HILIR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

SISKA SUGESIX

147310316

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, penulis merasakan sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian skripsi ini yang berjudul **”Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir”**. Salam shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan suritauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengetahuan sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaedah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin terdapat kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari pada pembaca.

Pada kesempatan ini juga penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat pada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan usulan Skripsi ini, kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi. SH.,MCL .

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bapak Dr. H. Moris adidi yogia, M.SI yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Budi Mulyanto, S.IP, M.SI selaku Ketua jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. H. Rahyunir Rauf M.SI selaku dosen pembimbing 1 (satu) atas ketulusan hati dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
5. Bapak Rizky Setiawan, S.IP.,M.SI selaku dosen pembimbing 2 (dua) yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing dalam menyelesaikan usulan penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
7. Bapak Indra Safri S.sos. M.SI selaku Dosen pembimbing akademik saya.
8. Terimakasih kepada Kantor Kepenghuluan Pekaitan yang telah memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
9. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sangat besar kepada Ayahanda Alm. Muchtar Kutin dan Ibunda Siti Hajar

tercinta serta kakak, abang, kakak ipar, dan abang ipar dan keluarga Sukma Sofia Sulantin, Diko Vais Ananda yang telah memberikan saya dukungan berupa materi, motivasi dan limpahan kasih sayang dalam menyelesaikan skripsi ini.

10. Terimakasih kepada teman-teman seangkatan IP.E 2014 terutama kepada sahabat BBC saya, Dewi Almira S.ip, Dina Astrika S.ip, Febriza Selvina S.ip dan Zahidatul Hkmah S.ip yang selalu memberi saya support dalam menulis skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya, semoga kita semua dalam lindungan allah SWT, dan sukses dimasa depan, Amin Ya Robbal'alam.
11. Terimakasih banyak kepada keluarga kedua tersayang Kak Lung Euis Lolye Fesa (Bagan Cacing) dan Kak Ngah Annad Wiyatul Husna (Kuba) yang telah memberikan saya support dalam menyelesaikan skripsi ini dan selalu ada dalam keadaan apapun.
12. Terimakasih Teruntuk Khoirul Muslim calon imamku insyaallah, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada teman –teman Evi Sungkuik, Liza Gustina S.ip, Sriwahyuni S.pd, Putri Ade Ningsih SE yang telah memberi saya suka dan duka .

Akhir kata hanya ucapan terimakasih yang bisa penulis berikan kepada semua orang-orang yang tersayang. Semoga Allah SWT membalas jasa-jasa pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khasanah cakrawala pemikiran bagi para pembaca.

Wabillahaufikwalhidayah, wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 26 Maret 2019

Penulis



DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah.....	16
C. Tujuan dan kegunaan penelitian.....	16
1. Tujuan penelitian	16
2. Kegunaan penelitian	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi kepustakaan.....	18
1. konsep pemerintahan.....	18
2. Konsep peranan	29
3. Konsep pembinaan	20
4. Konsep kebijakan	21
5. Konsep penghulu	22
6. Konsep lembaga kemasyarakatan	22
7. Konsep organisasi	24
B. Kerangka pikir	27
C. Konsep operasional	29
D. Operasional variabel.....	30
E. Teknik pengukuran.....	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian.....	36
B. Lokasi penelitian.....	36
C. Sampel dan Populasi	36
D. Teknik penarikan sampel	38
E. Jenis dan sumber data	38
F. Teknik pengumpulan data.....	39
G. Teknik analisis data.....	39
H. Jadwal dan waktu kegiatan penelitian.....	41

BAB IV TINJAUAN LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis.....	41
B. Keadaan Penduduk.....	42
1. Jumlah Penduduk.....	42
C. Pendidikan.....	42
D. Agama	43
E. Struktur Organisasi	44

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	46
1. Distributor Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kepenghuluan Pekaitan.....	46
2. Distribusi identitas responden berdasarkan umur dikepenghuluan pekaitan	47
B. Peranan Penghulu dalam membina Lembaga Kemasyarakatanrukun tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan PekaitanKecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.....	48
1. Pemberian Petunjuk	50
2. Pemberian Pendidikan dan Latihan.....	53
3. Pemberian Bimbingan.....	57
4. Pemberian Pengarahan	62
5. Memberikan Intruksi-intruksi	66
C. Faktor-Faktor Hambatan Peranan Penghulu Dalam MembinaLembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Wargadi Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.....	72

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....73
B. Saran.....74

DAFTAR PUSTAKA75

LAMPIRAN.....77



DAFTAR TABEL

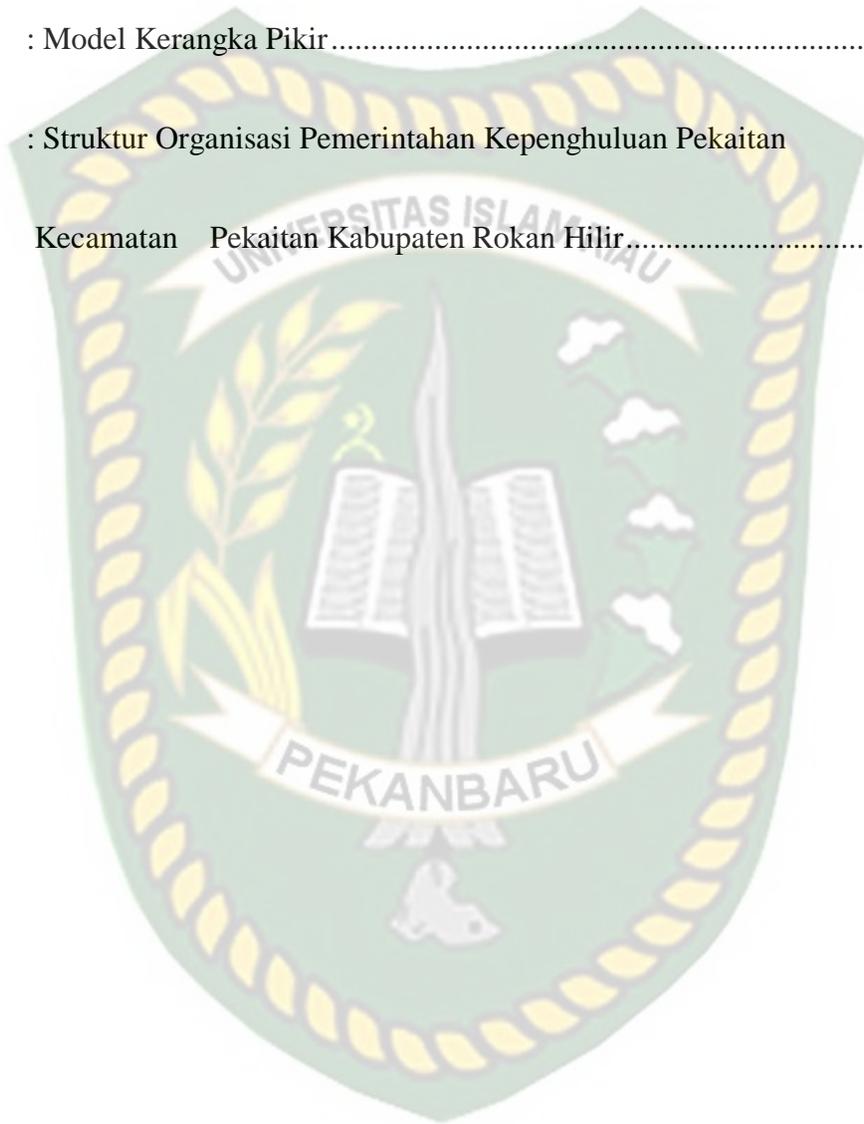
Tabel	Halaman
I.I : Nama dan Jumlah.....	14
II.2 : Penelitian Terdahulu.....	26
II.3 : Operasional Tabel.....	30
III.1 : Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	37
III.2 : Jadwal Waktu Penelitian.....	40
IV.1 : Jumlah Penduduk.....	42
IV.2 : Jumlah Sarana Pendidikan.....	42
IV.3 : Jumlah Pemeluk Agama.....	43
IV.4 : Jumlah Sarana Peribadahan.....	43
V.1 : Distribusi Tingkat Pendidikan Responden di Kepenghuluan Pekaitan.....	47
V.2 : Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Umur Responden.....	48
V.3 : Tanggapan Responden Tentang Pemberian Petunjuk.....	50
V.4 : Tanggapan Responden Tentang Memberikan Responden Pendidikan dan Pelatihan.....	54
V.5 : Tanggapan Responden Tentang Pemberian Bimbingan.....	58
V.6 : Tanggapan Responden Tentang Pemberian Pengarahan.....	62
V.7 : Tanggapan Responden Tentang Memberikan Intruksi-intruksi.....	67

V.8 : Rekapulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Penghulu
Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga
dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan
Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. 70



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
11.1 : Model Kerangka Pikir.....	28
IV.1 : Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisisioner.....	72
2. Daftar Wawancara.....	85
3. Daftar Telly Kuisisioner	88
4. Dokumentasi Penelitian	91
5. SK Dekan Fisipol UIR No.709/UIR-Fs/Kpts/2017 tentang Pembagian Tugas Pembimbingan dan Perbaikan UP, Skripsi, dan Kertas Kerja Mahasiswa Fisipol UIR Pekanbaru.....	95
6. Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/11782 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Prariset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi	96
7. Surat Rekomendasi Riset Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor 070/Kesbangpol/2018/276	97
8. Surat Keterangan Kantor Penghulu Pekaitan Nomor 001.4/PEM/SK/PKT/XI/2018/01 Sebagai Penunjang Dalam Penyusunan Tugas Akhir Kuliah.....	98

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Skripsi yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Siska Sugsix
NPM : 147310316
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Srata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyarakatan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak hanya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah ;
2. Bahwa seluruh persyaratan administratif, akademi, dan keuangan yang melekat padanya benar saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh Fakultas dan Universitas ;
3. Bahwa, apabila di kemudian hari apabila ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan bulur 1 dan 2 diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komferensif skripsi yang telah saya ikuti sera sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga .

Pekanbaru 15 Januari 2019



METERAI
KEMENTERIAN
KEMENTERIAN
6000
KEMENTERIAN

Siska

Siska Sugsix

**Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun
Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan
Kabupaten Rokan Hilir**

ABSTRAK

Siska Sugsix

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah kepenghuluan dalam pasal 3 dijelaskan Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan, Penghulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam hal ini merupakan tanggung jawab penghulu sebagai pemberian pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga agar berjalan dengan baik. Sejalan dengan tujuan peneliti ini, maka penulis ingin melihat pembinaan yang telah diberikan penghulu berjalan dengan baik untuk mengetahui fenomena-fenomena yang dihadapi dalam membina lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga. Adapun kurang bimbingan penghulu dalam membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir padahal bimbingan ini sangat penting sebagai kinerja Kepenghuluan, Adapun kurang tanggapnya lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga dalam menjalankan fungsinya, seperti didalam keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan dan juga dan juga hubungan antar masyarakat dan pemerintahnya, adapun populasi dan sampel pada peneliti ini ditetapkan rukun tetangga dan rukun warga sebanyak 15 orang dan masyarakat 11 orang. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sensus. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah primer dan skunder. Sedangkan teknik pengumpulan data melalui angket kuesioner, observasi, dokumentasi dan wawancara. Setelah data diperoleh lalu dikelompokkan menurut data, kemudian dilakukan perhitungan kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan beberapa indikator yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu, pemberian petunjuk, pemberian pendidikan dan pelatihan, pemberian bimbingan, pemberian pengarahan, dan memberikan intruksi-intruksi. Dan untuk ukuran variabel dalam penelitian ini penulis penulis membagi menjadi tiga kategori penilaian yaitu : bereperan, cukup bereperan dan kurang bereperan. berdasarkan hasil penelitian ini tentang peranan penghulu dalam membina lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga di kepenghuluan pekaitan kecamatan pekaitan kabupaten rokan hilir dikatakan cukup bereperan dengan presentase rentang nilai 50%. Maka penulis berharap agar penghulu lebih bisa membina lembaga kemasyarakatan khususnya rukun tetangga dan rukun warga lebih baik lagi.

Kata kunci : Peranan, Pembinaan, Lembaga Masyarakat

The Role of Pemulu in Fostering Rukun Tetangga Community Institutions and Rukun Warga in Kepenghuluan Pekaitan Pekaitan Subdistrict, Rokan Hilir Regency

ABSTRACT

Siska Sugsix

In the Rokan Hilir District Regulation No. 2 of 2009 concerning guidelines for organizing the organization and work procedures of the government in Article 3, it is explained that the Head of Office is acting as the executor of the initial government, Penghulu has the task of organizing government, development and community affairs. In this case, it is the responsibility of the headmaster to provide guidance to the Rukun Tetangga Community Institution and the Pillars of Citizens to run well. In line with the objectives of this researcher, the authors would like to see that the funding given by the headmaster goes well to find out the inhibiting factors faced in fostering community organizations in the neighborhood and the pillars of the community. As for the indication of the lack of responsiveness of the neighborhood association and the community unit in carrying out environmental security functions, we can see that there is still a working environment in the neighborhood and the community groups where there is no patrol post, indicated that there is less guidance from the village leaders in building community organizations and neighborhoods. the involvement of Pekaitan Subdistrict Relations in Rokan Hilir Regency even though this guidance is very important as a form of coaching as a Kepenghuluan performance. As for the population and sample of this researcher, there were 15 neighborhoods and 11 people. The sampling technique used is the census. The types and sources of data used are primary and secondary. While the technique of collecting data through questionnaires questionnaire, observation, documentation and interviews. After the data is obtained and then grouped according to data, then quantitative calculations are performed. In this study the authors explain several indicators that will be used in this study, namely, verification of instructions, provision of education and training, giving guidance, giving direction, and giving instructions. And for the size of the variables in this study the author divides into three categories of assessment, namely: having a role, quite a role and lacking in role. Based on the results of this study about the role of the head of building neighborhood organizations and pillars of residents in the sub-district linkages, there are enough plays a role with a percentage range of 50%. So the author hopes that the government will be better able to foster community institutions, especially neighborhood groups, and to get better citizenship.

Keywords: Role, Development, Community Institution

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala - gejala kekuasaan dalam masyarakat. Dengan demikian negara memerlukan manusia untuk mencapai tujuan yang di inginkan. Tujuan dari negara indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, dengan kata lain tujuan yang ingin di capai adalah mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mencapai tujuan tersebut negara membutuhkan yang berwenang untuk menentukan kebijaksanaan dalam rangka mewujudkan Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur tujuan negara yaitu pemerintah.

Dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan di Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah – daerah. Berdasarkan penjelasan UUD 1945 pasal (18) ayat (1) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah – daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu terbagi atas kabupaten dan Kota, yang tiap – tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintah Daerah, yang di atur dengan undang – undang.

Menurut yang saya lihat didalam UUD 1945 Indonesia adalah sebuah negara yang wilayahnya terbagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia

Didalam pembagian pemerintahan kabupaten kota sebagai pemerintah daerah yang memiliki kejelasan wilayah dan masyarakat, memiliki peran yang cukup besar dalam pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri. Dalam undang-undang nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ini dijelaskan bagaimana urusan yang menjadi kewenangan yang dapat dikerjakan oleh daerah dan urusan yang tidak dapat dikerjakan oleh daerah, yang pertama adalah urusan wajib yang merupakan yang wajib dikerjakan oleh setiap daerah seperti yang tertera pada pasal 14 ayat (1) yaitu :

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan
- b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
- e. Penanganan bidang kesehatan.
- f. Penyelenggaraan bidang pendidikan.
- g. Penanggulangan masalah sosial.
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.

- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
- j. Pengendalian lingkungan hidup.
- k. Pelayanan pertahanan.
- l. Pelayanan kedudukan, dan catatan sipil.
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan.
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal.
- o. Penyelenggaraan dasar lain.
- p. Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya yang tertera pada pasal 14 ayat (2), yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang diatas, pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan kewenangan-kewenangannya tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah kabupaten/kota menjalankan kewenangan dibantu oleh organisasi perangkat daerah diperlukan untuk dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah kabupaten/kota, disamping itu juga diperlukan adanya peran serta dukungan dari organisasi atau lembaga sosial kemasyarakatan.

Didalam penjelasan mengenai paratur pemerintah sebagai ujung tombak pembangunan serta berfungsi sebagai abdi masyarakat di tuntut untuk selalu proaktif bekerja dengan semangat yang tinggi dalam menghadapi persoalan yang ada dalam masyarakat dan harus mampu mengkoordinasi segala tuntutan dan kebutuhan yang ada. Dengan adanya hal tersebut maka akan terjadi juga peningkatan tugas dan tanggung jawab semua aparatur pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa. Kemudian untuk melaksanakan kepentingan tentang Desa maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Berdasarkan yang terdapat didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa desa (dalam hal ini kepenghuluan) desa adalah desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan

pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Disini dapat terlihat bahwa kepenghuluan dipimpin oleh seorang penghulu yang memimpin perangkat penghulu .kepenghuluan sebagai salah satu bagian dari pemerintah kabupaten/kota, juga perlu mengupayakan untuk mengelolah segenap sumber daya pemerintahnya, dengan tujuan agar organisasi kepenghuluan mampu mencapai tingkat kinerja yang optimal dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintah, pembangunan serta pelayanan masyarakat pada umumnya. Oleh karena dibentuknya lembaga kemasyarakatan didesa adalah untuk membantu kepala desa dalam pelaksanaan urusan pemerintah, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Undang-undang tersebut dalam pasal 26 kepala desa (kepenghuluan) disebutkan bahwa :

1. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala Desa berwenang;
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - c. Memegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. Menetapkan Peraturan Desa;
 - e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;

- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. Memanfaatkan teknologi tepat guna ;
 - m. Mengkoordinasikan perkembangan Desa secara partisipatif;
 - n. Mewakili Desa dalam dan di luar pengadilan atau manunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
 - o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berhak;
- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
 - b. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan Desa;
 - c. Menerima penghasilan tetap setiap bulan tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
 - d. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
 - e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.
4. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Desa berkewajiban:
- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;

- f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. Menjalinkan kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. Mengelola keuangan dan Aset Desa;
- j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. Mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. Memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 94 Tentang lembaga kemasyarakatan desa dinyatakan yaitu :

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana maksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
4. Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Berdasarkan yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah semakin lengkaplah landasan operasional peraturan mengenai Desa dan Kelurahan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Otonomi Daerah Kabupaten dan/atau Daerah Kota.

Selanjutnya yang Terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pada paragraf 2 Pasal 14 ayat (1) Tentang Desa ditegaskan bahwa tugas Kepala Desa adalah :

- a. Menyelenggarakan urusan Pemerintahan.
- b. Melaksanakan Pembangunan.
- c. Melaksanakan Kemasyarakatan.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya itu, Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Desa (BPD).
- b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa.
- c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDes) untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
- e. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- f. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif.
- g. Mewakili Desanya dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kemudian di dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatur di dalam pada pasal 14 tersebut, maka Kepala Desa mempunyai kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja Pemerintahan Desa.
- g. Menaati dan menegakkan seluruh Peraturan Perundang-Undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i. Melaksanakan dan bertanggung jawabkan pengelolaan keuangan Desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Desa.
- k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa.
- l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- m. Membina, menganyomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.
- n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa.
- o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah satu yang menjadi tugas kewajiban Kepala Desa adalah memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Desa". Dari sejumlah fungsi yang menjadi tanggung jawab seorang Kepala Desa maka tugas ini menggambarkan bahwa ruang lingkup bidang kegiatan Kepala Desa disamping tugas-tugas lain yakni melaksanakan sejumlah wewenang yang dilimpahkan Bupati sebagai mana diatur dalam pasal 14 ayat 1 juga melaksanakan fungsi-fungsi kemasyarakatan.

Berdasarkan yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada Pasal 14

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan.

Selanjutnya yang tertera pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 mempunyai fungsi

- a. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di Wilayahnya.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 4 ayat (2) yang mana fungsinya sebagai berikut :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat, penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta;
- d. Pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. Penggali, pendayagunaan dan penmbangan potensi sumber daya;
- g. Serta keserasian lingkungan hidup;
- h. Pengembangan kreatifitas, pencegahankenalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja;
- i. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- j. Pemberdayaan dan peningkatan hak politik masyarakat; dan

- k. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara Pemerintah Desa dan masyarakat.

Kemudian dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah kepenghuluan dalam pasal 3 disebutkan bahwa :

1. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan.
2. Penghulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan Pada Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang mempunyai tugas terdapat pada pasal 3 yaitu :

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah;
2. Memelihara kerukunan hidup warga;
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

Dalam melaksanakan tugasnya terdapat dalam pasal 4 RT juga mempunyai

Rukun Tetangga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian antar warga;
2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan pemerintah;
3. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga.

Selanjutnya pada pasal 5 fungsi Rukun Warga sebagai berikut:

1. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.
2. Membantu kelancaran dalam bidang pembangunan di kepenghuluan dan kelurahan.

Kemudian dalam pasal 6 tugas RW yaitu :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya.

2. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah.

Tujuan pembentukan Rukun Tetangga menurut Rauf (2005;42) adalah memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat berdasarkan gotong royong dan kekeluargaan merupakan sendi-sendi utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Sedangkan pengertian rukun warga menurut Rauf (2005;97) adalah Rukun Warga merupakan organisasi masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat dari masyarakat setempat, dan bukan termasuk Pemerintah, Pemerintah dalam hal ini hanya berfungsi mengakui Lembaga Rukun Warga tersebut selanjutnya dibina oleh Pemerintahan Kota/Kabupaten yang dalam hal ini adalah Kelurahan.

Kemudian adapun maksud dan tujuan dibentuknya RW dijelaskan Rauf (2005;98) adalah membantu Pemerintah Kota dalam memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan,serta menghimpun seluruh potensi dan swadaya masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan.

Lembaga kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang terdapat di Desa seeperti RT dan RW, Karang Taruna, LPM,PKK. Lembaga kemasyarakatan RT dan RW adalah lembaga yang ada di lingkungan kepenghuluan/desa lembaga ini berperan penting sebagai lembaga sosial dan perpanjangan tangan dari pemerintah untuk membawa pesan pembangunan.

Dalam melaksanakan kewenangan pemerintah yang dimiliki oleh perangkat kepenghuluan, terutama dalam hal pembangunan, pemberdayaan serta partisipatif masyarakat, pemerintah kepenghuluan tidak sendiri. Di setiap kepenghuluan ada lembaga kemasyarakatan yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra penghulu dalam memberdayakan masyarakat.

Di setiap desa terdapat berbagai jenis lembaga kemasyarakatan, hal ini tergantung kepada kebutuhan serta hasil kesepakatan bersama masyarakat. Pemerintah juga telah mempermudah masyarakat dalam hal menentukan dan membentuk lembaga kemasyarakatan yang ada di daerahnya masing-masing.

Dari penjelasan tugas penghulu salah satu tugas dan kewajiban penghulu adalah membina kehidupan masyarakat, ataupun membangun kehidupan masyarakat desa/kelurahan menjadi kepada kondisi yang lebih baik, bentuk-bentuk pembinaan kehidupan yang dapat dilakukan oleh kepala desa ialah memberikan penyuluhan, pengarahan dan bimbingan.

Pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan sebuah kegiatan yang harus ada, yang mana tujuannya yaitu membimbing atau melatih lembaga kemasyarakatan yang ada dikepenghuluan/kelurahan, seperti memberikan pelatihan Rukun Tetangga dan Rukun Warga tentang administrasi, sehingga tidak terjadi kesalahan serta dapat meningkatkan potensi masyarakat agar lebih inovatif dan berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki masyarakat.

pembinaan penting dilakukan karena administrasi dipandang sebagai unsur penting yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan pemerintahan. Penyelenggaran administrasi yang baik akan menjamin ketersediaan dan kesinambungan data dan informasi yang diperlukan terkait bidang tugas pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan. Penyelenggaraan yang baik harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan administrasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Merupakan upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi yang bermuara pada penyelenggaraan administrasi yang efektif, efisien, berdayaguna dan berhasilguna mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Selain itu pembinaan yang dilakukan karena pemerintah memerlukan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung program pembangunan pemerintah baik dalam bangunan fisik dan nonfisik, juga lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada baik dikepenghuluan itu sendiri tetapi justru datang dari kepenghuluan/kelurahan tersebut. Karna itu perlu pembinaan sebagai usaha memelihara dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.

Suatu pembinaan memberikan pengarahan kepada Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk mengajak masyarakat menjaga kebersihan, keindahan dan kerapian di lingkungan kepenghuluan pekaitan, yang masih terdapat masyarakat membuang sampah sembarangan dikarenakan tidak memiliki bak atau tong sampah,

serta kegiatan swadaya seperti gotong royong untuk membersihkan lingkungan disekitar desa masih kurang berjalan dengan baik.

Adapun nama-nama dan jumlah lembaga kemasyarakatan dikepenghuluan pekaitan ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Nama dan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan di Kepenghuluan Pekaitan

No.	Nama Lembaga	Jumlah	Yang masih berjalan
1.	LPM	1	Aktif
2.	BPK	1	Aktif
3.	PKK	1	Non-Aktif
4.	Karang Taruna	1	Aktif
5.	Rukun Tetangga	10	Aktif
6.	Rukun Warga	5	Aktif

Sumber: kantor Kepenghuluan Pekaitan

Dari data diatas dapat dijelaskan bahwa keberadaan lembaga-lembaga tersebut ditengah-tengah masyarakat dianggap sangat penting, karena lembaga ini berperan sebagai lembaga sosial yang diperlukan masyarakat. Salah satunya adalah lembaga Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Dan ini merupakan fokus dari pembahasan penelitian.

Kepenghuluan Pekaitan adalah kepenghuluan yang saya jadikan sebagai lokasi penelitian saya, yang saya lihat dikepenghuluan tersebut masih kurang pembinaan penghulu terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga mengenai fungsi keamanan lingkungan yang seharusnya sesuai dengan arahan camat kepada penghulu untuk dijalankan sebagaimana mestinya sehingga karna kurangnya pembinaan dari penghulu menyebabkan lembaga kemasyarakatan

khususnya Rukun Tetangga dan Rukun Warga tidak menjalankan tugasnya untuk kesejahteraan Desa.

Untuk itu perlu dilakukan pembinaan oleh Penghulu terhadap Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. sejauh ini Penghulu belum berperan dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, hal ini terlihat dari fenomena-fenomena yang penulis temukan antara lain :

1. kurang bimbingan penghulu dalam membina lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir padahal bimbingan ini sangat penting sebagai bentuk pembinaan terhadap kinerja kepenghuluan.
2. kurang tanggapnya lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam menjalankan fungsinya, seperti didalam keamanan lingkungan, kebersihan lingkungan dan juga hubungan antar sesama masyarakat dan pemerintahnya.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana peranan Penghulu dalam membina lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Peranan Penghulu dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga khususnya di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dari peranan Penghulu dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan RT dan RW Masyarakat Desa khususnya di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai bahan informasi Penghulu untuk mengatasi kendala-kendala yang menghambat Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Peneliti ini juga diharapkan agar dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti lainnya dalam persoalan yang sama kedepannya.
- c. Bagi sipenulis sebagai penambahan wawasan yang diperoleh selama kuliah terutama Ilmu Pemerintahan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Berdasarkan penelitian ini, maka penulis menjelaskan beberapa teori sesuai dengan judul penelitian yaitu Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dikepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian peneliti yang akan dihubungkan pada permasalahan.

Kehidupan bermasyarakat dengan adanya pemerintah akan menjadi sebuah garis-garis besar keteraturan kehidupan dalam bermasyarakat, bersamaan dengan munculnya negara sebagai organisasi yang relatif di kehidupan bermasyarakat maka pemerintah dapat teroganisir dan dapat melayani segala kebutuhan dalam cakupan pelayanan publik.

1. Konsep pemerintahan

Menurut Sumaryadi (2010;17) pemerintahan dalam bahasa inggris di sebut goverment yang berasal dari bahasa latin gubernane, grek kybernan, yang berarti mengemudi, dan mengendalikan.

Menurut Ndraha (2003;6) Pemerintah adalah organ berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan ketentuan (harapan) yang diperintah.

Menurut Rasyid dalam Gisello (2004;65) konsep pemerintahan adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah, selanjutnyapemerintahan memakainya sebagai proses menegakan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga serta memberi pelayanan bagi kemajuan bersama.

2. Konsep peranan

Menurut Soekanto (2003;243) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila orang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Soekanto (2001;269) adalah konsep tentang apa saja yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi, peran juga dapat dikatakan sebagai prilaku individu yang paling penting bagi struktur masyarakat soaial. Selanjutnya menurut Susanto (dalam Soekanto,2001;94) peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban ataupun disebut status objektif.

Dan masih dalam buku yang sama Levy (dalam Soekanto,2001;272) Pengertian peranan dari Levy bahwasanya jika sebuah struktur masyarakat hendak mempertahankan kelangsungannya maka harus melaksanakan perannya dengan baik, begitu juga dengan Camat harus melaksanakan perannya dalam membina Badan Permusyawaratan Kepenghuluan, jika dalam membina tersebut dapat terlaksana dengan baik maka urusan pemerintahan kecamatan semakin ringan karena badan

permusyawaratan kepenghuluan melaksanakan fungsi dan wewenangnya dengan baik.

Menurut Ndraha (2005:53) peran diartikan sebagai suatu pelaku yang diharapkan atau ditetapkan bagi pemerintah selaku administrator. Sehingga dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peran adalah kewajiban yang dimiliki oleh individu atau organisasi dan diharuskan segala sesuatu mengenai tugasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Pembinaan.

Menurut Ismail (dalam Dwi Kurniati 2012 ;19) mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah yang menghubungkan pusat pengetahuan dengan penerima atau pekeja dan penerima akhir (masyarakat) dapat meningkatkan taraf hidup kearah yang lebih sejahtera dan sempurna. Lebih lanjut Ismail (2001 ; 167-168) menyatakan bahwa tata cara membina adalah :

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuannya agar teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin dengan biaya yang relative rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dengan mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menterjemahkan maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tata cara berkomunikasi dari satu orang ke orang yang lain dengan melakukan kunjungan kerumah-rumah.
3. Dengan mengadakan pertunjukan atau demonstrasi. Pertunjukan atau demonstrasi . Pertunjukan atau demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang dilakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip ilmu.
4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan popular yang tujuannya khusus memberikan penerangan.

5. Kursus, merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal.

Sesuai dengan isi yang terdapat didalam kamus lengkap bahasa Indonesia bahwa “pembinaan berarti usaha, tindakan dan kegiatan yang digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang baik”. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik terhadap yang sudah ada (yang sudah dimiliki).

Menurut Nawawi pembinaan itu dilakukan dengan :

1. Memberikan, menjelaskan dan memperbaiki pemerintah agar pegawai melakukan kegiatan bekerja dengan menggunakan metode atau cara bekerja dan sasaran yang tepat.
2. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan suatu prosedur, penggunaan metode, penggunaan alat, menyusun rencana kerja, melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan beban kerja masing-masing dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan pembinaan dengan memberikan kesempatan dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kesejahteraan, pemberian motivasi, pembinaan disiplin, moral dan kesempatan kerja, peningkatan tanggung jawab dan lain-lain.
4. Memberikan kesempatan ikut berpartisipasi dengan menyumbangkan tenaga dan fikiran berdasarkan kreatifitas dan inisiatif masing-masing, baik mengenai struktur organisasi, kebijakan, prosedur kerja, perencanaan, pencatatan dan pelaporan serta upaya-upaya pembinaan personil, maupun dalam mewujudkan inovasi dalam menggunakan metode yang dalam mewujudkan produktifitas dari segi kualitasnya. (Nawawi, 2005:111)

Sedangkan Santoso (dalam Dwi Kurniati 2012 : 23) menyatakan bahwa

pembinaan merupakan untuk tercapainya hasil kerja yang baik maka diperlukan

beberapa ketentuan antara lainnya :

- a. Adanya bimbingan dari atasan
- b. Pemberian Motivasi
- c. Pengembangan Karier
- d. Memberi Penghargaan

4. Teori kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha aparat pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu (Kansil dan Cristine, 2003; 190)

Kebijakan dalam penelitian diartikan oleh Danim (1997; 10) sebagai tindakan-tindakan dimaksudkan untuk memecahkan masalah sosial.

Menurut Zaini Ali dan Kancil Al Hafis (2015; 3) kebijakan publik (inggris public policy) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik.

5. Konsep Kepenghuluan

Kepenghuluan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Konsep lembaga kemasyarakatan

Menurut Koentjaraningrat (2002: 146) masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.

Selanjutnya R.M. Macciver dan C.H. Page dalam Koentjaraningrat (2002: 148) mendefinisikan masyarakat sebagai sebuah komunitas yang berarti kesatuan hidup manusia, yang menepati suatu wilayah nyata, dan berinteraksi

menurut suatu sistem adat istiadat, serta yang terkait oleh suatu rasa identitas komunitas.

Masyarakat adalah memang sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”, suatu kesatuan manusia dapat mempunyai perasaan melalui apa warga-warganya dapat saling berinteraksi. Dimana interaksi tersebut merupakan seorang individu dalam masyarakat berbuat demikian rupa sehingga menimbulkan suatu respon atau reaksi dari individu-individu lain. (koentjaraningrat,2002;62).

Di kepenghuluan dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan. Pembentukan lembaga kemasyarakatan dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud mempunyai tugas membantu penghulu dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sedangkan fungsi dari lembaga kemasyarakatan yaitu :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat
- d. Penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif

- e. Penumbuh kembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swaday gotong royong masyarakat
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup
- g. Pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja
- h. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
- i. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat
- j. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kepenghuluan dan masyarakat.

Lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud mempunyai kewajiban:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- b. Menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait
- c. Menaati seluruh peraturan perundang-undangan
- d. Menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat ; dan
- e. Membantu penghulu dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan mempunyai kegiatan:

- a. Peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. Pengembangan kemitraan;
- d. Pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan hidup; dan
- e. Peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

7. Konsep organisasi

Menurut pendapat Moekijat,(2005;6) organisasi adalah kerangka di dalam orang-orang bertindak dan organisasi mengandung pengertian adalah penyusunan tenaga kerja dan pembagian tugas-tugas. Mengorganisasi adalah menyusun bagian-

bagian sedemikian rupa sehingga seluruhnya bekerja sebagai suatu badan yang disatukan.

Kelangsungan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari adanya peranan dari segenap anggota organisasi yang mampu melaksanakan tugasnya, sehingga dapat dikatakan bahwa anggota organisasi merupakan salah satu sumber daya manusia yang mendukung kelangsungan suatu organisasi.

Organisasi merupakan suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan melalui hirarki otoritas dan tanggung jawab. tercapainya efektivitas pelaksanaan tugas sebagai bidang organisasi tentunya tidak terlepas dari proses pengorganisasian. Organisasi adalah suatu sistem kerja sama antara dua orang atau lebih yang secara sadar dimaksud untuk mencapai tujuan. Amitai Etzioni (1958;78) mengatakan bahwa masyarakat terdiri organisasi-organisasi, dimana hampir semua dari kita melewati masa hidup dengan bekerja untuk kepentingan organisasi. Dengan demikian organisasi adalah suatu unit sosial (pengelompokan sosial) yang sengaja dibentuk dan dibentuk kembali dengan penuh pertimbangan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Namun untuk mendefinisikan organisasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Hal ini karena organisasi merupakan suatu yang abstrak, sulit dirasakan namun bisa dirasakan eksistensinya. Stephan. P. Robbins (1994;4) menyatakan bahwa organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat

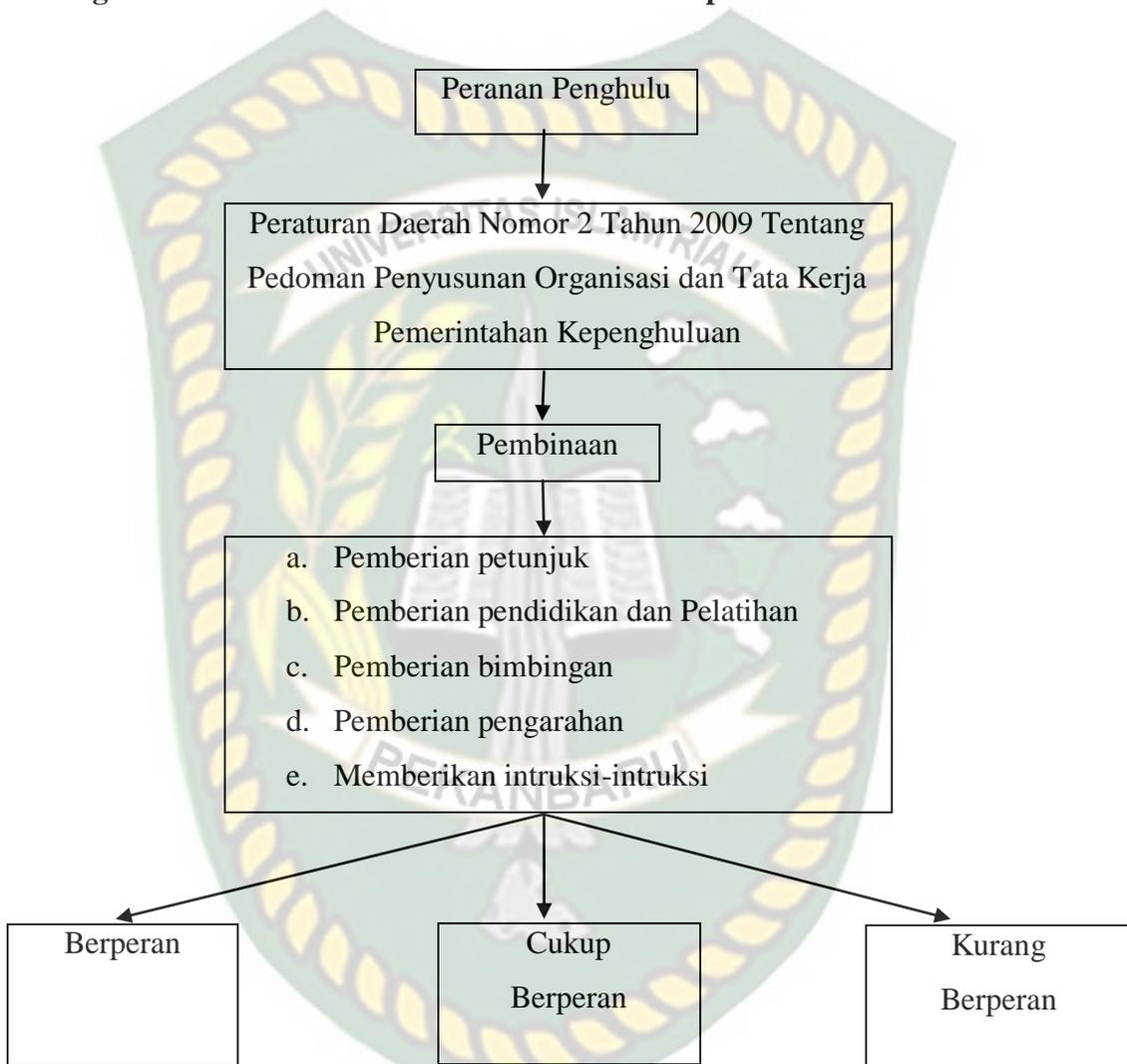
diidentifikasi, yang bekerja atas dasar relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

B. Kerangka Pemikiran

Pembinaan penghulu terhadap lembaga kemasyarakatan sangat diharapkan agar bagaimana kehidupan masyarakat dapat berjalan lebih baik. Berdasarkan pengamatan di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir bahwa lembaga kemasyarakatan tidak berperan semestinya, sehingga dipertanyakan bagaimana peranan penghulu dalam melakukan pembinaan. Melalui beberapa teori yang penulis dapatkan menurut para ahli bahwa pembinaan dapat berupa penyuluhan, pemberian bimbingan, pemberian pengarahan. Jika pembinaan tersebut dapat berjalan dengan baik tentunya lembaga kemasyarakatan dapat berperan semestinya sehingga kehidupan masyarakat akan terjalin dan terbina lebih baik dengan kondisi yang kondusif.

Lebih jelasnya dapat di gambarkan melalui kerangka pikiran tersebut :

Gambar : II.1: Model kerangka Pikir Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Keenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.



Sumber : modifikasi Penelitian, 2018

C. Konsep Operasional

Untuk mempermudah tulisan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan menghindari dari kesalahan atau pemahaman dalam proses penelitian ini maka penulis mengoperasionalkan konsep-konsep yaitu:

1. Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam suatu peristiwa.
2. Penghulu adalah penyelenggaraan urusan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
3. Lembaga kemasyarakatan adalah suatu sistem tata kelakuan dan berhubungan yang berpusat kepada aktivitas-aktivitas dalam masyarakat.
4. Pembinaan adalah usaha memelihara, melatih dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi.
5. Rukun Tetangga adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat sosial, yang keberadaannya diakui dan dibina pemerintah Desa/Kepenghuluan.
6. Rukun warga adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga dibawah wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintahan dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Desa.

D. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional Variabel Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Konsep	Variabel	Indikator	Indikator Dinilai	Ukuran
1	2	3	4	5
Menurut Soekanto (2003;243) Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila orang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.	Peranan Penghulu dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir	1. Pemberian petunjuk	1. Mendapatkan Bimbingan Pelaksanaan Tugas RT dan Rw 2. Mendapatkan Pengarahan Pelaksanaan Tugas RT dan RW 3. Mendapatkan Pemahaman Pelaksanaan Tugas RT dan RW	Beperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		2. Pemberian pendidikan dan pelatihan	1. Upaya Perbaikan Kinetja 2. Mendapatkan Petunjuk Teknis 3. Upaya Meningkatkan Keterampilan	Beperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		3. pemberian bimbingan	1. Upaya Membina Kemampuan 2. Mendapatkan Intruksi Lisan/Tulisan 3. Melakukan Diskusi dalam Pertemuan Rutin	Beperan Cukup Berperan Kurang Berperan
		4. pemberian Pengarahan	1. Pemberian Arahan 2. Pemberian Petunjuk 3. Pemberian Langkah-langkah	Beperan Cukup Berperan Kurang Berperan

1	2	3	4	5
		5. Memberikan Intruksi-intruksi	1. adanya intruksi lisan 2. adanya intruksi tertulis 3. adanya perintah	Berperan Cukup Berperan Kurang Berperan

Sumber : data olahan penelitian, 2018

E. Teknik Pengukuran

Penilaian pengukuran terhadap Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Pembinaan kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir dapat dikatakan :

Berperan : Apabila seluruh indikator berada pada kategori berperan atau penilaian skor antara 67-100%

Cukup berperan : Apabila seluruh indikator berada pada kategori cukup berperan atau pada penilaian skor antara 34-66%

Kurang berperan : Apabila seluruh indikator berada pada kategori kurang berperan atau pada penilaian skor antara 1-33%

a. Pemberian Petunjuk

Berperan : Apabila penghulu telah melakukan pembinaan melalui pemberian bimbingan pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi mengajak, menunjuk, mengiringi serta mendorong orang / perangkat dalam lembaga kemasyarakatan dengan menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pembangunan rakapitulasi jawaban responden berkisar antara 67-100%

Cukup berperan : Apabila penghulu telah memberikan 2 dari 3 bentuk pembinaan kepada RT dan RW untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 43-66%

Kurang berperan : Apabila penghulu hanya memberikan 1 saja atau tidak memberikan bimbingan kepada RT dan RW untuk menggerakkan pembangunan atau rakapitulasi jawaban responden berkisar antara 1-33%

b. pemberian Pendidikan dan Pelatihan

Berperan : Apabila penghulu telah melakukan pembinaan pengarahan RT dan RW yang meliputi pemberian arahan, pemberian petunjuk, pemberian langkah-langkah orang / perangkat dala RT dan RW untuk menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan

pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67-100%

Cukup Berperan : Apabila penghulunya telah memberikan dalam bentuk pengarahan 2 dari 3 kegiatan kepada RT dan RW untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34-66%

Kurang Berperan: Apabila penghulunya memberikan pembinaan dalam bentuk pengarahan 1 dari 3 untuk pengarahan atau tidak ada sama sekali kepada lembaga-lembaga atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 1-33%

c. pemberian Bimbingan

Berperan : apabila peranan penghulu dalam pembinaan Lembaga Kemasyarakatan dalam bentuk intruksi/lisan RT dan RW dikepenghuluan pekaitan kecamatan pekaitan kabupaten rokan hilir untuk menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67-100%

Cukup berperan : apabila peran penghulu dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam bentuk intruksi/lisan 2 dari 3

kegiatan kepada RT dan RW untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34-66%

Kurang berperan : apabila peran penghulu dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam bentuk intruksi/lisan 1 dari 3 untuk intruksi/lisan atau tidak ada sama sekali kepada lembaga-lembaga atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 1-33%

d. pemberian pengarahan

Berperan : Apabila penghulu telah melakukan pembinaan melalui pemberian arahan pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi mengajak, menunjuk, mengiringi serta mendorong orang / perangkat dalam lembaga kemasyarakatan dengan menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pembangunan rakapitulasi jawaban responden berkisar antara 67-100%

Cukup berperan : apabila peran penghulu dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam bentuk arahan 2 dari 3 kegiatan kepada RT dan RW untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 34-66%

Kurang berperan : apabila peran penghulu dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan dalam bentuk arahan 1 dari 3 untuk arahan atau tidak ada sama sekali kepada lembaga-lembaga atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 1-33%

e. pemberian intruksi-intruksi

Berperan : Apabila penghulu telah melakukan pembinaan melalui pemberian perintah pada lembaga kemasyarakatan yang meliputi mengajak, menunjuk, mengiringi serta mendorong orang / perangkat dalam lembaga kemasyarakatan dengan menjalankan tugas-tugas untuk kepentingan pembangunan rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 67-100%

Cukup berperan : Apabila penghulu telah memberikan 2 dari 3 bentuk pembinaan kepada RT dan RW untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 43-66%

Kurang berperan : Apabila penghulu hanya memberikan 1 saja atau tidak memberikan perintah kepada RT dan RW untuk menggerakkan pembangunan atau rekapitulasi jawaban responden berkisar antara 1-33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Dalam penelitian ini untuk mempermudah peneliti dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Menurut sugiono (2009:14) penelitian kuantitatif adalah penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data yang berbentuk kualitatif yang diangkakan. Tipe penelitian ini adalah Deskriptif yaitu bentuk deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta pada kantor unit penyelenggara pelabuhan. Menurut sugiono (2013:8) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan variabel satu dengan variabel lainnya dengan jenis data dan analisisnya kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka.

B. Lokasi penelitian

Berdasarkan penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, untuk menjalankan tugas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku terlihat masih banyak masalah-masalah yang bermunculan.

C. Sampel dan populasi

Populasi yang saya jadikan dalam penelitian ini yaitu :

Populasi dan sampel adalah dua bentuk yang berbeda namun di dalam hal ini yang membedakannya adalah menurut Usman dan Akbar (2011:42) menyatakan: populasi ialah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengsekelompokan objek yang lengkap dan jelas maka populasi dalam penelitian ini terdiri dari seluruh pemerintah kepenghuluan pekaitan.

Sedangkan sampel adalah sebagai anggota populasi yang diambil menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik sampling (Usman dan Akbar 2011:43), yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pemerintahan kepenghuluan pekaitan dan RT dan RW nya. Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat jumlah populasi dan sampel pada tabel dibawah ini :

Pemerintah Kepenghuluan Pekaitan , RT dan RW, masyarakat yang datanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.1. jumlah Sampel dan Populasi Penelitian Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

No.	Unit populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Penghulu	1	1	100%
2.	Sekretaris desa	1	1	100%
3.	Ketua Rukun Tetangga (RT)	10	10	100%
4.	Ketua Rukun Warga (RW)	4	4	100%

5.	Tokoh masyarakat	10	10	100%
	Jumlah	26	26	100%

Sumber : Hasil penelitian, 2018

D. Teknik Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penarikan sampel bertolak pada jumlah populasi yang diambil dilapangan yang dijadikan sampel yang turut mendukung dalam pengumpulan data sehingga dalam teknik penarikan sampel ini menggunakan metode sensus karena mengingat jumlah populasi di Kepenghuluan Pekaitan hanya sedikit untuk penghulu dan sekretaris desa. Sedangkan untuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan masyarakat digunakan teknik penarikan random sampling menurut Sugiono (2001:57) teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi.

E. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data yang diambil atau yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, kuisisioner dan observasi dan dokumentasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana peranan penghulu dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga Dikepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

b. Data Sekunder

Data yang telah tersedia, diperoleh dengan cara membaca laporan-laporan, peraturan-peraturan dan buku-buku yang telah ada pada kantor penghulu Dikepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

F. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) . kuisisioner, dalam hal ini penulis membuat seperangkat pertanyaan atau daftar pertanyaan yang nantinya akan di isi oleh responden yang dapat menjawab tujuan dari penelitian.
- 2) Observasi, yaitu kegiatan pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap gejala-gejala yang akan diteliti yang ada hubungannya dengan pemecahan masalah.
- 3) Wawancara, penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak yang terlibat atau responden, untuk memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- 4) Dokumentasi, pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan teliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan keadaan lokasi penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Setelah data yang diperlukan oleh penulis tersebut telah terkumpul maka data tersebut akan diolah dengan jenis data yang diperoleh, lalu dipelajari serta dilakukan analisis secara deskriptif, maksudnya adalah dengan cara ,menggambarkan dan memaparkan data yang diperoleh berdasarkan dengan kenyataan dilapangan.



BAB IV

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis

Sejak pertengahan abad XV sesudah pudarnya Kerajaan Rokan pertama di Kotalama, maka berdiri kerajaan rokan bernama Kerajaan Pekaitan yang mengambil nama berdasarkan nama negeri tersebut yaitu negeri pekaitan. Rajanya bergelar yang bertuan besar sungai daun yang memiliki nama asli raja kunto. Negeri pekaitan terletak di seberang bagansiapi-api di sebelah barat sungai besar \pm 5 kilometer dari muara sungai rokan. Kepenghuluan pekaitan yang merupakan tempat lokasi penelitian, terletak di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir adalah Pemekaran dari Kecamatan Bangko.

Adapun kepenghuluan yang ada dikecamatan Pekaitan adalah Kepenghuluan Karyo Mulyo Sari, Kepenghuluan Suak Temenggung, Kepenghuluan Suak Air Hitam, Kepenghuluan Telak Bano, Kepenghuluan Rokan Baru, Kepenghuluan Rokan Baru Pesisir, Kepenghuluan Kubu 1 dan Kepenghuluan Pekaitan

Kepenghuluan Pekaitan adalah salah satu Kepenghuluan yang ada di Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, yang mana Kepenghuluan Pekaitan mempunyai luas permukiman 29 ha, perkebunan 315 ha, ladang 682 ha, rawa-rawa 180 ha, perkantoran 1 ha, sekolah 2,5 ha Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.218 jiwa yang terdiri dari 641 laki-laki dan 577 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 239 kepala keluarga

Kepenghuluan Pekaitan berbatasan langsung dengan :

Sebelah Utara : Sungai Rokan
Sebelah Selatan : Kubu 1
Sebelah Barat : Kep.Panji-panji
Sebelah Timur : Sei.Besar/Kubu 1

B. Keadaan Penduduk

1. Jumlah Penduduk

Dibawah ini akan dipaparkan jumlah penduduk yang ada di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

Tabel IV.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

NO	Jenis kelamin	jumlah	Persentase
1	Laki-laki	641	52,6%
2	Perempuan	577	47,4%
Jumlah		1.218	100%

Sumber : Kantor Kepenghuluan Pekaitan

Dari tabel IV.I diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Kepenghuluan Pekaitan jumlah penduduknya jenis kelamin laki-laki besar daripada jumlah penduduk kelamin perempuan, yaitu jumlah penduduk jenis kelamin perempuan 641 jiwa sedangkan jenis kelamin laki-laki 577

C. Pendidikan

Pada tahun 2018 di Kepenghuluan Pekaitan terdapat 1 Sekolah Taman Kanak-Kanak, 1 Sekolah Dasar, 1 Sekolah Lanjutan Pertama dan 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.2. Jumlah sarana pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Tahun	Jumlah
1.	TK	2018	1
2.	SD SEDERAJAT	2018	1
3.	SMP	2018	1
4.	SMA	2018	1
5.	SI	-	-
	JUMLAH		

Sumber : Kantor Penghulu Pekaitan 2018

D. Agama

Mayoritas penduduk di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir adalah pemeluk agama islam lebih banyak sebagian memeluk agama kristen termasuk kedua dan disusul katolik dengan urutan ketiga terbanyak dengan komposisi tabel dibawah ini:

Tabel IV.3. Jumlah Pemeluk Agama

No	Pemeluk agama	Jumlah
1.	Islam	639
2.	Kristen	53
3.	Katolik	526
4.	Budha	-
5.	Hindu	-
	Jumlah	1.218

Sumber : kantor Penghulu Pekaitan 2018

Tabel IV.4. Jumlah Sarana Peribadahan

No	Tahun	Sarana peribadahan	Jumlah
1	2018	Mesjid	2
2	2018	Mushallah	1
3	2018	Gereja	6

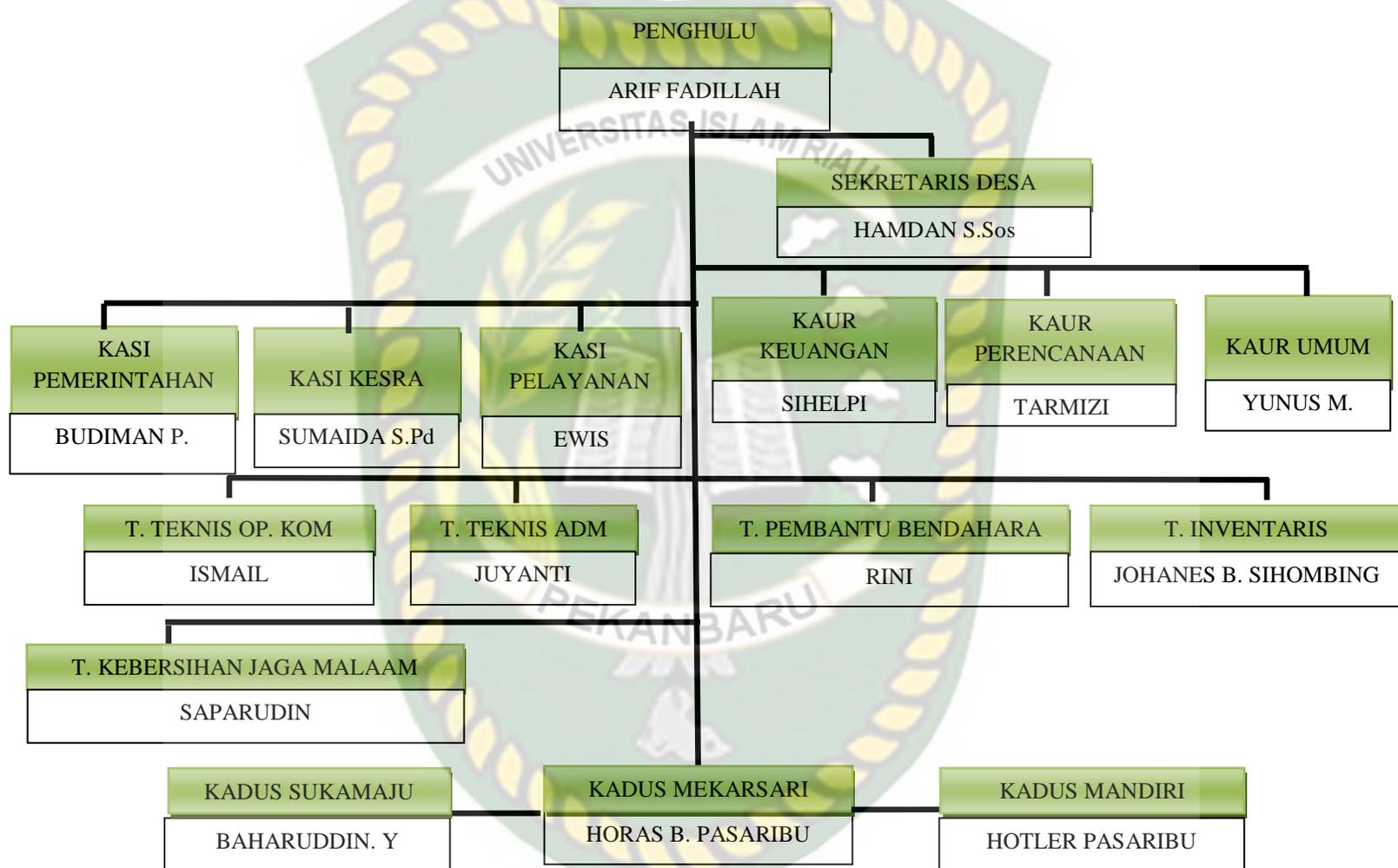
4	2018	Vihara	-
5	2018	Pura	-
	Jumlah		9

Sumber : Kantor Penghulu Pekaitan 2018

E.Struktur Organisasi Kantor Penghulu Pekaitan



Gambar IV.1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden dipaparkan menyesuaikan dengan jumlah sampel yang ditetapkan yang ikut terlibat dalam penelitian dan identitas responden yang dijadikan sampel, sehingga dari sini dapat pulak dilihat kemampuan responden, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kemampuan responden dalam memahami dan menjawab kuisisioner yang peneliti berikan. Namun khusus responden Penghulu, hanya dilakukan wawancara maka tidak ditampilkan dalam tabel identitas responden.

1. Distributor Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kepenghuluan Pekaitan

Pendidikan responden yang merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh karena itu dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi.

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan untuk terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1. Distribusi Identitas Tingkat Pendidikan Responden di Kepenghuluan Pekaitan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/Sedrajat	9	35%
2	SMP/Sedrajat	5	19%
3	SMA/Sedrajat	5	19%
4	Diploma/DIII	-	0%
5	Sarjana/S1	7	27%
	Total	26	100%

Sumber : Kantor Penghulu Pekaitan 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Aparat Pemerintah Kepenghuluan (Penghulu, Sekretaris Desa) dan lembaga kemasyarakatan serta masyarakat bervariasi, yaitu yang memiliki pendidikan paling dominan adalah SD yang berjumlah 9 orang atau (35%) dan SLTP 5 orang atau (19%) serta yang mempunyai pendidikan S.1 berjumlah 7 orang atau (27%).

2. Distribusi identitas responden berdasarkan umur di kepenghuluan pekaitan

Umur responden mempengaruhi kemampuan dan ketelitian dalam bekerja, maka hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam penguasaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang diemban dalam organisasi pemerintahan. Kemudian umur bagi seorang pegawai juga sangat mempengaruhi kinerjanya karena dengan umur yang baik maka tingkat pengalaman yang mereka miliki akan semakin baik pula selanjutnya disini dapat dilihat masa kerja dari aparat kantor kepenghuluan pekaitan yaitu :

Tabel V.2. Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Umur Responden.

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	4	15 %
2	31-40 Tahun	6	23%
3	41-50 Tahun	13	50%
4	>50 Tahun	3	12%
Total		26	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dengan melihat tabel diatas maka diketahui bahwa umur dari responden aparat kantor penghulu (penghulu, sekretaris desa) pada umumnya telah memiliki umur 41-50 tahun keatas yaitu sebanyak 13 orang.

B.Peranan Penghulu dalam membina Lembaga Kemasyarakatan rukun tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan melaksanakan program pembangunan dan pelaksanaan pada masyarakat di satu sisi, menjadi tanggung pemerintah namun pada sisi lain sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah membina lembaga-lembaga masyarakat agar masyarakat dan pemerintah saling bergandeng tangan dalam memikul tanggung jawab dan mensejahterakan masyarakat.

Masalah sumber daya manusia mendapat perhatian secara khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku dengan kualitas dan kinerja yang tinggi dan berbagi potensi yang ada dalam masyarakat dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan maka bertumpu kepada bagaimana pimpinan dan bawahan dapat bekerja secara baik. Dimana dalam hal ini pihak pimpinan

harus mampu memotivasi dalam meningkatkan semangat dan gairah kerja pegawai tidak sesuai dengan yang diinginkan, tentu saja akan berakibat tidak baik pada perkembangan tugas ataupun kemajuan organisasi pemerintahan tersebut, kalau saja PNS tidak berkualitas dalam bekerja tentu saja tugas dan tanggung jawab yang diembankan pemerintah akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah kepenghuluan dalam pasal 3 disebutkan bahwa :

3. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan.
4. Penghulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Setelah menyebarkan kuisioner kepada responden yang ikut terlibat dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari unsur Penghulu / Perangkat Kepenghuluan, Lembaga kemasyarakatan dan yang merasa dampak dari pembinaan itu sendiri yaitu masyarakat Kepenghuluan, maka selanjutnya penulis mengolah data tersebut, melakukan pengelompokan data berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing pembagian responden penelitian, maka selanjutnya disini akan diuraikan secara terperinci mengenai Peranan Penghulu dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

1. Pemberian petunjuk

Buku petunjuk bagi setiap organisasi maupun perorangan sebagian diperlukan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan setiap tugas yang akan dilakukan karna dengan adanya buku petunjuk dari pimpinan maupun seseorang yang berkompeten dalam wilayah kerjanya maka setiap pekerjaan ataupun metode dari organisasi tersebut akan dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden tentang ada atau tidak pemberian petunjuk pada lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka memperlancar tugas-tugas mereka di Kepenghuluan Pekaitan, tanggapan mereka dapat dilihat seperti data tabel berikut ini :

Tabel V.3. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Petunjuk

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Mendapatkan Bimbingan Pelaksanaan Tugas RT dan Rw	1 (4%)	20 (77%)	5 (19%)	26 (100%)
2	Mendapatkan Pengarahan Pelaksanaan Tugas RT dan RW	4 (15%)	19 (79%)	3 (12%)	26 (100%)
3	Mendapatkan Pemahaman Pelaksanaan Tugas RT dan RW	3 (12%)	18 (69%)	5 (19%)	26 (100%)
Jumlah		8	57	13	78
Rata-rata		4	16	6	26
Persentase		15%	61%	24%	100%

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa pemberian literatur yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 4 orang atau (26 %) dikategorikan berperan. Dari 4 orang tersebut sebanyak orang pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberikan petunjuk pada mereka dalam bekerja dan pengambilan suatu keputusan. Sementara itu dari 4 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan pernah mempunyai petunjuk terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan masyarakat.

Selanjutnya dari 26 responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 16 orang atau (61%) terkategori cukup berperan. Selanjutnya dari 15 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan cukup berperan sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga merasa bahwa Penghulu Pekaitan kurang lengkap petunjuknya terutama mengenai kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Sementara itu dari 15 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 3 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan tidak memiliki petunjuknya bagi mereka terutama tentang kedudukan dan peran mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial dan mereka jarang diberi

petunjuk. Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa tentang adanya buku petunjuk yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden. Lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 6 orang atau (24%) dikategorikan kurang berperan.

Dari 6 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah masyarakat dan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada mempunyai buku petunjuknya pada mereka untuk menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan anggaran Kepenghuluan, kemudian mereka juga merasakan Penghulu Pekaitan tidak mempunyai buku petunjuknya terutama mengenai setiap kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja. Sementara itu dari 6 orang responden yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan tidak memiliki buku petunjuknya terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial.

Dari hasil wawancara dengan Penghulu Pekaitan Bapak Arif Fadillah *“kantor kami sudah melakukan pembinaan dengan baik hanya saja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, tapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membina pemberian petunjuk ini”*. (pada hari Rabu 15 september, jam 09.18WIB). Dari analisa data tabel V.3 dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemberian petunjuk terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan

Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat dikategorikan “kurang berperan” atau pada persentase 1%-33%.

2. Pemberian pendidikan dan latihan

Masalah sumber manusia mendapatkan perhatian secara khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku. Dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka profesionalisme dapat ditingkatkan selanjutnya tugas-tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan mental).

Penilaian memang penting bagi pencapaian tujuan tugas-tugas pekerjaan pengembangan individu dalam kelompok kerja, dan penting bagi segala bentuk program peningkatan kerja melalui pelatihan dan penyuluhan. Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi sebagai salah satu upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara terus menerus. Karena organisasi harus berkembang, untuk mengantisipasi perubahan diluar organisasi, untuk itu maka kemampuan sumber daya manusia dalam suatu

organisasi harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan kemajuan dan perkembangan organisasi, maka dari itu dapat dilihat disini fungsi dari penghulu dalam melakukan pembinaan yang dilihat dari indikator memberikan pelatihan dan pendidikan :

- a. Adanya pemberian keterampilan
- b. Adanya pemberian pendidikan
- c. Adanya pemberian latihan

Dari informasi yang diperoleh maka dapat dilihat tanggapan responden yang terdiri dari berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.4. Tanggapan Responden Tentang Memberikan Responden Pendidikan dan Pelatihan.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Upaya Perbaikan Kinerja	2 (8%)	19 (73%)	5 (19%)	26 (100%)
2	Mendapatkan Petunjuk Teknis	6 (23%)	13 (50%)	7 (27%)	26 (100%)
3	Upaya Meningkatkan Keterampilan	4 (15%)	14 (54%)	8 (31%)	26 (100%)
Jumlah		12	43	20	75
Rata-rata		6	15	5	26
Persentase		23%	58%	19%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Berdasarkan tanggapan berbagai responden dari lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa yang memberikan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang

mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 6 orang atau (23%) dikategorikan berperan. Dari 6 orang tersebut sebanyak 4 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa penghulu pekaitan telah memberikan pendidikan dan latihan dalam bekerja seperti diklat mengenai kepemimpinan dari latihan terutama mengenai setiap kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program kerja. Kemudian dari 6 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 4 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberikan Pendidikan dan latihan pada lembaga kemasyarakatan untuk membuat program-program kerja dan melakukan setiap pekerjaan yang ada.

Sementara itu dari 6 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana Penghulu Pekaitan memberi mereka pendidikan dan latihan sebagai pimpinan yang merupakan sebagai kaki tangan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Kepenghuluan Bapak Hamdani S.sos yaitu *“kalau menurut saya sudah berjalan pembinaannya tetapi karna ada beberapa kendala pembinaan itu kurang berjalan”*.(pada hari Rabu 15 September,jam 09.43 WIB).

Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberikan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan

terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 15 orang atau (58%) dikategorikan cukup berperan. Dari 15 orang tersebut sebanyak 7 adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan hanya dalam waktu tertentu memberikan pendidikan dan latihan mengenai suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan administrasi kepenghuluan. Selanjutnya dari 15 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 9 orang adalah masyarakat dan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kurang dalam memberikan pendidikan dan latihan pada lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bertujuan untuk melakukan setiap kegiatan organisasi yang ada agar berjalan dengan sebaik mungkin.

Sementara itu dari 15 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan hampir tidak pernah memberikan pendidikan dan latihan terutama tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat yang sangat beraneka ragam jenisnya serta mengenai diklat kepemimpinan.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberikan pendidikan dan latihan yang dilakkan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 5 orang atau (19%) dikategorikan kurang berperan dari 5 orang tersebut sebanyak 2 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka

menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan pendidikan dan latihan pada mereka bagaimana meningkatkan keamanan dan ketertiban yang ada di Kepenghuluan Pekaitan . kemudian dari 5 orang sebanyak 3 orang adalah masyarakat mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan pendidikan dan latihan.

Selanjutnya dari 5 orang responden yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan Penghulu Pekaitan pernah memberikan pendidikan dan latihan pada mereka mengenai pembuatan program-program kerja yang benar dan baik.

Dari hasil analisa data tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Penghulu dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat di kategorikan “cukup berperan’ atau pada persentase 34%-66%.

3. Pemberian bimbingan

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan ini informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan desa. Menyadari tingkat pengetahuan masyarakat desa relatif rendah karena itu pembinaan dari penghulu sangat diperlukan terutama pembinaan pembimbingan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di

Kepenghuluan. Sehubungan dengan proses pemberian bimbingan berdasarkan temuan dilapangan penghulu pekaitan telah melakukannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak kepenghuluan diperoleh informasi bahwa pemerintah kepenghuluan telah memberikan bimbingan berupa petunjuk, kemudian mendorong dan mengiring tujuan dari lembaga-lembaga yang mereka kelola seperti, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden dan masyarakat yang mengelola lembaga kemasyarakatan yang ada di Kepenghuluan Pekaitan tersebut maka penilaian terhadap jawaban mereka dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel V.5. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Bimbingan.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Upaya Membina Kemampuan	2 (8%)	15 (58%)	9 (35%)	26 (100%)
2	Mendapatkan Intruksi Lisan/Tulisan	5 (19%)	11 (42%)	10 (39%)	26 (100%)
3	Melakukan Diskusi dalam Pertemuan Rutin	4 (15%)	20 (77%)	2 (8%)	26 (100%)
Jumlah		11	46	21	78
Rata-rata		5	17	4	26
Persentase		19%	65%	16%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dari tanggapan berbagai responden merupakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta masyarakat yang ada bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun

Warga sebanyak 5 orang atau (19%) dikategori baik. Dari 5 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberi petunjuk dalam pendataan penduduk, pengamanan lingkungan dan kegiatan desa telah memberi petunjuk, mendorong dan menggiring mereka untuk masyarakat. Selanjutnya mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan membuat program-program kerja selanjutnya dari 26 responden pengurus lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang terkategori berperan sebanyak 5 orang adalah masyarakat dimana mereka juga merasa Penghulu Pekaitan telah memberi petunjuk kepada lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga terutama konsolidasi penyusunan program-program kerja serta juga mendorong dan menggiring Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kepenghuluan Pekaitan untuk selalu aktif dalam membina lembaga kemasyarakatan di Kepenghuluan Pekaitan.

Berdasarkan wawancara penulis Penghulu Pekaitan Arif Fadillah *“Didalam pembinaan bimbingan kan ada salah satunya penyampaian, kalau masalah melakukan diskusi masih sulit untuk mengumpulkan semua RT dan RW karna sering beralasan mempunyairesibukan sehingga yg ingin disampai tidak bisa dijalankan”* (pada hari Rabu 15 September, jam 10.25 WIB). Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada menunjukkan bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 5 orang atau (19%) dikategorikan cukup berperan. Dari 5 orang tersebut sebanyak

2 orang adalah Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kadang-kadang dalam waktu tertentu ada memberikan petunjuk dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan program kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan keputusan Penghulu serta juga mendorong serta menggerakkan mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kemudian dari 5 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kurang dalam memberi bimbingan, mendorong dan menggiring lembaga kemasyarakatan untuk program-program kerja, baik dalam bentuk bulanan maupun program kerja tahunan. Mereka menyatakan Penghulu tidak pernah memberikan petunjuk pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya dari 5 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dikategorikan cukup berperan sebanyak 2 orang adalah masyarakat dimana mereka juga merasa Penghulu Pekaitan kadang-kadang saja memberikan petunjuk terutama mengenai kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta mendorong dan menggiring Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selalu aktif.

Sementara itu dari 5 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan sangat jarang dan hampir tidak pernah memberi mereka petunjuk terutama tentang kedudukan dan peran mereka sebagai pimpinan

masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial yang terjadi apapun yang akan terjadi di masa akan datang.

Dari tabel V.5 Diatas terlihat bahwa tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan masyarakat yang ada bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan Terhadap 26 . responden yang mengelola lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 4 orang atau (16%) dikategorikan kurang berperan. Dari 4 orang tersebut sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan petunjuk pada mereka baik dalam menjalanan maupun melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan program Kepenghuluan. Kemudian sebanyak dari 4 orang responden yang terkategori kurang berperan tersebut sebanyak 2 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberi petunjuk, mendorong dan menggiring lembaga kemasyarakatan untuk membuat program-program kerja. Selanjutnya dari 4 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberi petunjuk dalam berbagai kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga baik dalam mendorong dan menggiring untuk selalu aktif membina keamanan dan ketertiban di Kepenghuluan Pekaitan.

Dari analisa data tabel V.5 disimpulkan bahwa pemberian bimbingan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di

Kepenghuluan Pekaitan di kategorikan “cukup berperan” atau pada persentase 34%-66%.

4. Pemberian pengarahan

Dalam melakukan pembinaan selama melakukan introgasi kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di Kepenghuluan Pekaitan maka seharusnya Penghulu juga harus memberikan pengarahan terhadap setiap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga hal ini bertujuan agar setiap lembaga yang ada dapat bekerja secara optimal sehingga bentuk pembangunan tidak saja di pikul oleh pemerintah kepenghuluan tapi juga oleh masyarakat.

Sehubungan dengan proses pemberian pengarahan berdasarkan temuan dilapangan Penghulu Pekaitan telah melakukan wawancara dengan pihak Kepenghuluan diperoleh informasi bahwa pemerintahan kepenghuluan telah memberikan pengarahan berupa arahan, petunjuk pemberian langkah-langkah, terhadap berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kepenghuluan Pekaitan kemudian untuk mengetahui tanggapan responden yang mengelola lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kepenghuluan Pekaitan apakah mereka mendapat pengarahan dari Penghulu Pekaitan jawaban mereka dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Pengarahan.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Pemberian Arahan	3 (12%)	18 (69%)	5 (19%)	26 (100%)
2	Pemberian Petunjuk	8 (31%)	4 (42%)	7 (27%)	26 (100%)
3	Pemberian Langkah-langkah	7 (27%)	15 (58%)	4 (15%)	26 (100%)

Jumlah	18	44	16	78
Rata-rata	8	12	6	26
Persentase	31%	46%	23%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 8 orang atau (31%) dikategorikan berperan. Dari 8 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberikan pengarahan pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam bekerja, seperti dalam penyusunan jumlah penduduk serta juga memberi petunjuk dan langkah-langkah pada mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Selanjutnya dari 8 orang responden yang terkategori berperan tersebut sebanyak 3 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberi pengarahan, petunjuk dan langkah-langkah untuk membuat program-program kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sedangkan dari 8 responden yang terkategori berperan tersebut sebanyak 3 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasakan bahwa Penghulu Pekaitan pernah memberi mereka pengarahan dan petunjuk terutama tentang tugas mereka sebagai pimpinan masyarakat dan juga mereka diberi petunjuk, tentang menanggulangi keamanan lingkungan dan pencegahan

penyakit masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekdes Pekaitan Bapak Hamdani, S.Sos “*untuk saat ini pengarahan yang telah kami berikan sudah sesuai , seperti salah satunya pemberian langkah-langkah untyk melakukan kegiatan RT dan RW, tetapi mungkin masih ada beberapa yang tidak berjalan tetapi menurut saya ya itu sudah d beri pengarahan*”(pada hari Rabu 15 September, jam 10.40 WIB).

Selanjutnya dari data tabel V.6 tersebut juga dapat diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan tentang pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terdapat 26 responden yang mengelola berbagai lembaga Kemasayarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dimana sebanyak 12 orang atau (46%), dikategorikan cukup baik, dari 12 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan dalam waktu tertentu ada memberikan pengarahan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti penyusunan kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan, pengarahan mengenai penyusunan program-program kerja dan untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang di kembangkan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Sementara itu dari 12 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan kadang-kadang memberikan pengarahan tentang kedudukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai pimpinan masyarakat terutama dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial. Dari 12 orang

responden 3 orang adalah masyarakat dimana mereka juga merasa bahwa Penghulu Pekaitan kurang memberikan pengarahan.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberikan pengarahan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 6 orang atau (23%) dikategorikan kurang berperan dari 6 orang tersebut sebanyak 4 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan pengarahan dalam menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan perencanaan pembangunan, kemudian sebanyak 6 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberikan pengarahan untuk membuat dan menyusun program-program kerja yang dilakukan setiap tahunnya untuk lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Sementara itu dari 6 orang responden yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberi pengarahan tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan di tengah masyarakat.

Dari analisa data tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pengarahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat di kategorikan “cukup berperan” ada pada persentase 34%-66%”.

5. Memberi intruksi-intruksi

Pembangunan kepenghuluan harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan Kepenghuluan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh kepenghuluan yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusianya dan daya dukung alamnya. Salah satu kegiatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan kepenghuluan ini adalah dengan adanya peraturan yang bisa mengatur dan sebagai acuan kegiatan dari pemerintah Kepenghuluan.

Guna menjalankan setiap kegiatan yang ada serta guna meningkatkan pembangunan yang ada di Kepenghuluan maka perlu adanya peranan dari pimpinan dari kepenghuluan dalam memberikan intruksi guna memperlancar setiap pembangunan yang dilakukan dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator.

- Adanya intruksi lisan
- Adanya intruksi tertulis
- Adanya perintah

Maka dari itu sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan maka selanjutnya dapat dilihat tanggapan responden yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel V.7. tanggapan Responden Tentang Memberi Intruksi-intruksi.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Adanya Intruksi	10	10	6	26

	Lisan	(38%)	(38%)	(24%)	(100%)
2	Adanya Intruksi Tertulis	8 (31%)	11 (42%)	7 (27%)	26 (100%)
3	Adanya Perintah	9 (15%)	12 (46%)	5 (19%)	26 (100%)
Jumlah		27	33	18	78
Rata-rata		9	11	6	26
Persentase		35%	42%	23%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dengan melihat tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ada bahwa memberi intruksi-intruksi yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 9 orang atau (35%) dikategorikan berperan, dari 9 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberikan intruksi-intruksi dalam bekerja serta juga mendorong serta menggerakkan mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kemudian anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga merasa bahwa Prnghulu Pekaitan telah memberikan intruksi-intruksi terutama tentang pengembangan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja untuk selalu aktif membina warga. Selanjutnya 9 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 3 orang adalah masyarakat dan penguraa Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberi intruksi-intruksi pada mereka untuk membuat program-program kerja yang disusun setiap

tahunnya. Sementara itu dari 9 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 2 orang adalah Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan pernah memberi intruksi-intruksi terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.

Dari hasil wawancara penulis dengan Penghulu Pekaitan Bapak Arif Fadillah *“kalau dalam bentuk surat sepertinya tidak ada kendala , kadang-kadang ada beberapa RT Dan RW yang tidak datang”*(pada hari Rabu 15 September, jam 11 WIB) Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa pemberian intruksi yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 11 orang atau (42%) dikategorikan cukup berperan dari 11 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kadang-kadang dalam waktu tertentu ada memberi intruksi-intruksi dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan suatu kebijakan kepenghuluan.

Selanjutnya dari 11 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 3 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kurang dalam memberi intruksi-intruksi kepada lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk membuat program-program kerja, setiap bulannya bahwa program kerja tahunan. Sementara itu dari 11 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah

ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan sangat jarang dan hampir tidak pernah memberi intruksi-intruksi terutama tentang kedudukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai pimpinan masyarakat.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberi intruksi-intruksi yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberi intruksi-intruksi pada mereka dalam menjalankan tugasnya, kemudian mereka juga merasa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberi intruksi-intruksi mengenai kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja.

Dari analisa data tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberi intruksi-intruksi terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat dikategorikan “kurang berperan ” atau pada persentase 1 %-33%.

Dari lima indikator mengenai Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.Selanjutnya dari analisa yang telah dibuat diatas maka dapat di tarik rekapitulasi dari jawaban responden tersebut yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Penghulu dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan

Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Pemberian petunjuk	4 (15%)	16 (61)	6 (23%)	26 (100%)
2	Pemberian pendidikan dan latihan	6 (23%)	15 (58%)	5 (19%)	26 (100%)
3	Pemberian bimbingan	5 (19%)	17 (65%)	4 (16%)	26 (100%)
4	Pemberian pengarahan	8 (31%)	12 (46%)	6 (23%)	26 (100%)
5	Memberikan intruksi-intruksi	9 (35%)	11 (42%)	6 (23%)	26 (100%)
Jumlah		32	71	27	125
Rata-rata		7	13	6	26
Persentase		(27%)	(50%)	(23%)	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai “Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir” maka dapat di kategorikan Cukup Berperan. Hal ini dapat terlihat dari tanggapan responden yang ada dari 26 responden maka yang terkategorikan berperan ada sebanyak 7 responden dan atau 27%, yang terkategori cukup berperan ada sebanyak 13 responden atau 50% dan yang terkategori kurang berperan ada sebanyak 6 orang atau 23%. Dengan kata lain sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat ternyata 50 % berada pada interval 34%-66% dengan kategori cukup berperan.

Menyikapi hasil rekapitulasi dari pemerintahan kepenghuluan lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan masyarakat ini,

berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan belum berperan secara maksimal karena dilapangan masih banyak dijumpai program pembinaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Penghulu.

C. Faktor-Faktor Penghambat Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Walaupun secara fisik Pembinaan penghulu terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini berjalan cukup layak, namun demikian pembinaannya masih banyak terdapat kelemahan dan kendala yang terdapat pada pemerintah kepenghuluan oleh seorang Penghulu sebagai aparat yang diberi tugas dan fungsi dalam membina kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini.

Dalam menjalankan fungsinya ini banyak hambatan yang dihadapi oleh Penghulu terutama dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang antara lain yaitu :

- a. Dalam pembinaan kelembagaan rukun tetangga dan rukun warga, pemberian bimbingan kurang terjadi dengan baik antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kepenghuluan bersama Penghulu dalam membina lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga, sampai saat ini penghulu kurang menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pemberian bimbingan, seperti bimbingan mengenai penyusunan program-program kerja juga menggiring Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk

selalu aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di kepenghuluan.

- b. Kurang tersedianya dana khusus untuk membeli dan membuat buku petunjuk bagi lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Padahal buku pedoman ini sangat penting untuk menunjang kinerja lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam menjalankan tugasnya (hasil wawancara dengan sekretaris kepenghuluan tanggal 25 oktober 2018)
- c. Sulitnya mengumpulkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada suatu waktu pelatihan dan bimbingan karena masing-masing mereka mempunyai kepentingan kinerja yang berbeda satu dengan lainnya. Aspek yang perlu diteliti adalah seberapa jauh pembinaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, perlu pula diteliti apa pula manfaat yang dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan oleh pembinaan tersebut dalam masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

B. Identitas Responden

Identitas responden dipaparkan menyesuaikan dengan jumlah sampel yang ditetapkan yang ikut terlibat dalam penelitian dan identitas responden yang dijadikan sampel, sehingga dari sini dapat pulak dilihat kemampuan responden, baik dalam pelaksanaan tugas maupun kemampuan responden dalam

memahami dan menjawab kuisisioner yang peneliti berikan. Namun khusus responden Penghulu, hanya dilakukan wawancara maka tidak ditampilkan dalam tabel identitas responden.

2. Distributor Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kepenghuluan Pekaitan

Pendidikan responden yang merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan untuk dapat melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh karena itu dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi.

Pendidikan merupakan cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang bertujuan untuk terciptanya keserasian dalam melakukan pekerjaan untuk lebih jelasnya maka dapat dilihat tingkat pendidikan responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1. Distribusi Identitas Tingkat Pendidikan Responden di Kepenghuluan Pekaitan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD/Sedrajat	9	35%
2	SMP/Sedrajat	5	19%
3	SMA/Sedrajat	5	19%
4	Diploma/DIII	-	0%
5	Sarjana/S1	7	27%
Total		26	100%

Sumber : Kantor Penghulu Pekaitan 2018

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan Aparat Pemerintah Kepenghuluan (Penghulu, Sekretaris Desa) dan lembaga kemasyarakatan serta masyarakat bervariasi, yaitu yang memiliki pendidikan paling dominan adalah SD yang berjumlah 9 orang atau (35%) dan SLTP 5 orang atau (19%) serta yang mempunyai pendidikan S.1 berjumlah 7 orang atau (27%).

2. Distribusi identitas responden berdasarkan umur di kepenghuluan pekaitan

Umur responden mempengaruhi kemampuan dan ketelitian dalam bekerja, maka hal ini sangat penting untuk diperhatikan dalam penguasaan pekerjaan dan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan yang diemban dalam organisasi pemerintahan. Kemudian umur bagi seorang pegawai juga sangat mempengaruhi kinerjanya karena dengan umur yang baik maka tingkat pengalaman yang mereka miliki akan semakin baik pula selanjutnya disini dapat dilihat masa kerja dari aparat kantor kepenghuluan pekaitan yaitu :

Tabel V.2. Distribusi Identitas Responden Berdasarkan Umur Responden.

No	Umur	Jumlah	Persentase (%)
1	20-30 Tahun	4	15 %
2	31-40 Tahun	6	23%
3	41-50 Tahun	13	50%
4	>50 Tahun	3	12%
Total		26	100%

Sumber : Hasil Penelitian 2018

Dengan melihat tabel diatas maka diketahui bahwa umur dari responden aparat kantor penghulu (penghulu, sekretaris desa) pada umumnya telah memiliki umur 41-50 tahun keatas yaitu sebanyak 13 orang.

B.Peranan Penghulu dalam membina Lembaga Kemasyarakatan rukun tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

Penyelenggaraan pemerintahan selain bertujuan melaksanakan program pembangunan dan pelaksanaan pada masyarakat di satu sisi, menjadi tanggung pemerintah namun pada sisi lain sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah membina lembaga-lembaga masyarakat agar masyarakat dan pemerintah saling bergandeng tangan dalam memikul tanggung jawab dan mensejahterakan masyarakat.

Masalah sumber daya manusia mendapat perhatian secara khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku dengan kualitas dan kinerja yang tinggi dan berbagi potensi yang ada dalam masyarakat dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kepentingan masyarakat.

Untuk dapat mencapai tujuan maka bertumpu kepada bagaimana pimpinan dan bawahan dapat bekerja secara baik. Dimana dalam hal ini pihak pimpinan harus mampu memotivasi dalam meningkatkan semangat dan gairah kerja pegawai tidak sesuai dengan yang diinginkan, tentu saja akan berakibat tidak baik pada perkembangan tugas ataupun kemajuan organisasi pemerintahan tersebut, kalau saja PNS tidak berkualitas dalam bekerja tentu saja tugas dan tanggung jawab yang diembankan pemerintah akan menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu maka melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 tentang pedoman penyusunan organisasi dan tata kerja pemerintah kepenghuluan dalam pasal 3 disebutkan bahwa :

5. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana penyelenggaraan pemerintah kepenghuluan.

6. Penghulu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Setelah menyebarkan kuisisioner kepada responden yang ikut terlibat dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yang terdiri dari unsur Penghulu / Perangkat Kepenghuluan, Lembaga kemasyarakatan dan yang merasa dampak dari pembinaan itu sendiri yaitu masyarakat Kepenghuluan, maka selanjutnya penulis mengolah data tersebut, melakukan pengelompokan data berdasarkan indikator dan item penilaian masing-masing pembagian responden penelitian, maka selanjutnya disini akan diuraikan secara terperinci mengenai Peranan Penghulu dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir yaitu :

6. Pemberian petunjuk

Buku petunjuk bagi setiap organisasi maupun perorangan sebagian diperlukan sebagai salah satu cara untuk melaksanakan setiap tugas yang akan dilakukan karna dengan adanya buku petunjuk dari pimpinan maupun seseorang yang berkompeten dalam wilayah kerjanya maka setiap pekerjaan ataupun metode dari organisasi tersebut akan dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin.

Selanjutnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari responden tentang ada atau tidak pemberian petunjuk pada lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam rangka memperlancar tugas-tugas mereka di Kepenghuluan Pekaitan, tanggapan mereka dapat dilihat seperti data tabel berikut ini :

Tabel V.3. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Petunjuk

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Mendapatkan Bimbingan Pelaksanaan Tugas RT dan Rw	1 (4%)	20 (77%)	5 (19%)	26 (100%)
2	Mendapatkan Pengarahan Pelaksanaan Tugas RT dan RW	4 (15%)	19 (79%)	3 (12%)	26 (100%)
3	Mendapatkan Pemahaman Pelaksanaan Tugas RT dan RW	3 (12%)	18 (69%)	5 (19%)	26 (100%)
Jumlah		8	57	13	78
Rata-rata		4	16	6	26
Persentase		15%	61%	24%	100%

Sumber : Data Olahan 2018

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa pemberian literatur yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 4 orang atau (26 %) dikategorikan berperan. Dari 4 orang tersebut sebanyak orang pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah

memberikan petunjuk pada mereka dalam bekerja dan pengambilan suatu keputusan. Sementara itu dari 4 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan pernah mempunyai petunjuk terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan masyarakat.

Selanjutnya dari 26 responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 16 orang atau (61%) terkategori cukup berperan. Selanjutnya dari 15 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan cukup berperan sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga merasa bahwa Penghulu Pekaitan kurang lengkap petunjuknya terutama mengenai kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Sementara itu dari 15 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 3 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan tidak memiliki petunjuknya bagi mereka terutama tentang kedudukan dan peran mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial dan mereka jarang diberi petunjuk. Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa tentang adanya buku petunjuk yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden. Lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 6 orang atau (24%) dikategorikan kurang berperan.

Dari 6 orang tersebut sebanyak 5 orang adalah masyarakat dan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada mempunyai buku petunjuknya pada mereka untuk menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan anggaran Kepenghuluan, kemudian mereka juga merasakan Penghulu Pekaitan tidak mempunyai buku petunjuknya terutama mengenai setiap kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja. Sementara itu dari 6 orang responden yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan tidak memiliki buku petunjuknya terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan dalam menyelesaikan setiap persoalan sosial.

Dari hasil wawancara dengan Penghulu Pekaitan Bapak Arif Fadillah *“kantor kami sudah melakukan pembinaan dengan baik hanya saja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, tapi kami tetap berupaya semaksimal mungkin untuk membina pemberian petunjuk ini”*.(pada hari Rabu 15 september, jam 09.18WIB). Dari analisa data tabel V.3 dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemberian petunjuk terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat dikategorikan “kurang berperan” atau pada persentase 1%-33%.

7. Pemberian pendidikan dan latihan

Masalah sumber manusia mendapatkan perhatian secara khusus, terutama yang berkaitan dengan kualitas, sikap dan tingkah laku. Dengan kualitas dan kinerja yang tinggi maka profesionalisme dapat ditingkatkan selanjutnya tugas-

tugas umum pemerintah dan pembangunan dapat dilakukan secara efisien dan efektif.

Masalah sumber daya manusia, sebenarnya dapat dilihat dari dua aspek, yakni kuantitas dan kualitas. Kuantitas menyangkut jumlah sumber daya manusia (penduduk) yang kurang penting kontribusinya dalam pembangunan, dibandingkan dengan aspek kualitas. Bahkan kuantitas sumber daya manusia tanpa disertai dengan kualitas yang baik akan menjadi beban pembangunan suatu bangsa. Sedangkan kualitas menyangkut mutu sumber daya manusia tersebut, yang menyangkut kemampuan, baik kemampuan fisik maupun kemampuan non fisik (kecerdasan mental).

Penilaian memang penting bagi pencapaian tujuan tugas-tugas pekerjaan pengembangan individu dalam kelompok kerja, dan penting bagi segala bentuk program peningkatan kerja melalui pelatihan dan penyuluhan. Pendidikan dan pelatihan dalam suatu organisasi sebagai salah satu upaya untuk pengembangan sumber daya manusia, merupakan suatu siklus yang harus dilakukan secara terus menerus. Karena organisasi harus berkembang, untuk mengantisipasi perubahan diluar organisasi, untuk itu maka kemampuan sumber daya manusia dalam suatu organisasi harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan kemajuan dan perkembangan organisasi, maka dari itu dapat dilihat disini fungsi dari penghulu dalam melakukan pembinaan yang dilihat dari indikator memberikan pelatihan dan pendidikan :

- d. Adanya pemberian keterampilan
- e. Adanya pemberian pendidikan

f. Adanya pemberian latihan

Dari informasi yang diperoleh maka dapat dilihat tanggapan responden yang terdiri dari berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, maka dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.4. Tanggapan Responden Tentang Memberikan Responden Pendidikan dan Pelatihan.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Upaya Perbaikan Kinerja	2 (8%)	19 (73%)	5 (19%)	26 (100%)
2	Mendapatkan Petunjuk Teknis	6 (23%)	13 (50%)	7 (27%)	26 (100%)
3	Upaya Meningkatkan Keterampilan	4 (15%)	14 (54%)	8 (31%)	26 (100%)
Jumlah		12	43	20	75
Rata-rata		6	15	5	26
Persentase		23%	58%	19%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Berdasarkan tanggapan berbagai responden dari lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa yang memberikan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 6 orang atau (23%) dikategorikan berperan. Dari 6 orang tersebut sebanyak 4 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa penghulu pekaitan telah memberikan pendidikan dan latihan dalam bekerja seperti diklat mengenai kepemimpinan dari latihan terutama mengenai setiap kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan

program kerja. Kemudian dari 6 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 4 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberikan Pendidikan dan latihan pada lembaga kemasyarakatan untuk membuat program-program kerja dan melakukan setiap pekerjaan yang ada.

Sementara itu dari 6 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana Penghulu Pekaitan memberi mereka pendidikan dan latihan sebagai pimpinan yang merupakan sebagai kaki tangan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sekretaris Kepenghuluan Bapak Hamdani S.sos yaitu *“kalau menurut saya sudah berjalan pembinaannya tetapi karna ada beberapa kendala pembinaan itu kurang berjalan”*. (pada hari Rabu 15 September, jam 09.43 WIB).

Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberikan pendidikan dan latihan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 15 orang atau (58%) dikategorikan cukup berperan. Dari 15 orang tersebut sebanyak 7 adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan hanya dalam waktu tertentu memberikan pendidikan dan latihan mengenai suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan administrasi kepenghuluan. Selanjutnya dari 15 orang

responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 9 orang adalah masyarakat dan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kurang dalam memberikan pendidikan dan latihan pada lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bertujuan untuk melakukan setiap kegiatan organisasi yang ada agar berjalan dengan sebaik mungkin.

Sementara itu dari 15 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan hampir tidak pernah memberikan pendidikan dan latihan terutama tentang bagaimana cara menghadapi masyarakat yang sangat beraneka ragam jenisnya serta mengenai diklat kepemimpinan.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberikan pendidikan dan latihan yang dilakkan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 5 orang atau (19%) dikategorikan kurang berperan dari 5 orang tersebut sebanyak 2 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan pendidikan dan latihan pada mereka bagaimana meningkatkan keamanan dan ketertiban yang ada di Kepenghuluan Pekaitan . kemudian dari 5 orang sebanyak 3 orang adalah masyarakat mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan pendidikan dan latihan.

Selanjutnya dari 5 orang responden yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan Penghulu Pekaitan pernah memberikan pendidikan dan latihan pada mereka mengenai pembuatan program-program kerja yang benar dan baik.

Dari hasil analisa data tabel V.4 diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Penghulu dalam memberikan pendidikan dan pelatihan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat di kategorikan “cukup berperan’ atau pada persentase 34%-66%.

8. Pemberian bimbingan

Suatu rencana kerja yang baik tentu harus diawali dengan berbagai informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan ini informasi terutama dari mereka yang akan dijadikan objek dari pembangunan itu sendiri. Hal ini diperlukan bila pembangunan untuk masyarakat maka keinginan masyarakatlah yang harus dijadikan acuan bagi penyusunan berbagai program pembangunan desa. Menyadari tingkat pengetahuan masyarakat desa relatif rendah karena itu pembinaan dari penghulu sangat diperlukan terutama pembinaan pembimbingan bagi lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kepenghuluan. Sehubungan dengan proses pemberian bimbingan berdasarkan temuan dilapangan penghulu pekaitan telah melakukannya. Berdasarkan wawancara dengan pihak kepenghuluan diperoleh informasi bahwa pemerintah kepenghuluan telah memberikan bimbingan berupa petunjuk, kemudian

mendorong dan mengiring tujuan dari lembaga-lembaga yang mereka kelola seperti, Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kemudian untuk mengetahui tanggapan responden dan masyarakat yang mengelola lembaga kemasyarakatan yang ada di Kepenghuluan Pekaitan tersebut maka penilaian terhadap jawaban mereka dapat dilihat seperti pada tabel berikut :

Tabel V.5. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Bimbingan.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Upaya Membina Kemampuan	2 (8%)	15 (58%)	9 (35%)	26 (100%)
2	Mendapatkan Intruksi Lisan/Tulisan	5 (19%)	11 (42%)	10 (39%)	26 (100%)
3	Melakukan Diskusi dalam Pertemuan Rutin	4 (15%)	20 (77%)	2 (8%)	26 (100%)
Jumlah		11	46	21	78
Rata-rata		5	17	4	26
Persentase		19%	65%	16%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dari tanggapan berbagai responden merupakan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta masyarakat yang ada bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 5 orang atau (19%) dikategori baik. Dari 5 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberi petunjuk dalam pendataan penduduk, pengamanan lingkungan dan kegiatan desa telah memberi

petunjuk, mendorong dan menggiring mereka untuk masyarakat. Selanjutnya mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan membuat program-program kerja selanjutnya dari 26 responden pengurus lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang terkategori berperan sebanyak 5 orang adalah masyarakat dimana mereka juga merasa Penghulu Pekaitan telah memberi petunjuk kepada lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga terutama konsolidasi penyusunan program-program kerja serta juga mendorong dan menggiring Rukun Tetangga dan Rukun Warga Kepenghuluan Pekaitan untuk selalu aktif dalam membina lembaga kemasyarakatan di Kepenghuluan Pekaitan.

Berdasarkan wawancara penulis Penghulu Pekaitan Arif Fadillah *“Didalam pembinaan bimbingan kan ada salah satunya penyampaian, kalau masalah melakukan diskusi masih sulit untuk mengumpulkan semua RT dan RW karna sering beralasan mempunyaikesibukan sehingga yg ingin disampai tidak bisa dijalankan”* (pada hari Rabu 15 September, jam 10.25 WIB). Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada menunjukkan bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 5 orang atau (19%) dikategorikan cukup berperan. Dari 5 orang tersebut sebanyak 2 orang adalah Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kadang-kadang dalam waktu tertentu ada memberikan petunjuk dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan program kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan keputusan

Penghulu serta juga mendorong serta menggerakkan mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Kemudian dari 5 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kurang dalam memberi bimbingan, mendorong dan menggiring lembaga kemasyarakatan untuk program-program kerja, baik dalam bentuk bulanan maupun program kerja tahunan. Mereka menyatakan Penghulu tidak pernah memberikan petunjuk pelatihan kepada lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya dari 5 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang dikategorikan cukup berperan sebanyak 2 orang adalah masyarakat dimana mereka juga merasa Penghulu Pekaitan kadang-kadang saja memberikan petunjuk terutama mengenai kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta mendorong dan menggiring Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selalu aktif.

Sementara itu dari 5 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan sangat jarang dan hampir tidak pernah memberi mereka petunjuk terutama tentang kedudukan dan peran mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial yang terjadi apapun yang akan terjadi di masa akan datang.

Dari tabel V.5 Diatas terlihat bahwa tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan masyarakat yang ada

bahwa pemberian bimbingan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan Terhadap 26 . responden yang mengelola lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 4 orang atau (16%) dikategorikan kurang berperan. Dari 4 orang tersebut sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan petunjuk pada mereka baik dalam menjalankan maupun melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan program Kepenghuluan. Kemudian sebanyak dari 4 orang responden yang terkategori kurang berperan tersebut sebanyak 2 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberi petunjuk, mendorong dan menggiring lembaga kemasyarakatan untuk membuat program-program kerja. Selanjutnya dari 4 orang responden pengurus lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberi petunjuk dalam berbagai kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga baik dalam mendorong dan menggiring untuk selalu aktif membina keamanan dan ketertiban di Kepenghuluan Pekaitan.

Dari analisa data tabel V.5 disimpulkan bahwa pemberian bimbingan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan di kategorikan “cukup berperan” atau pada persentase 34%-66%.

9. Pemberian pengarahan

Dalam melakukan pembinaan selama melakukan introgasi kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di Kepenghuluan Pekaitan maka seharusnya Penghulu juga harus memberikan pengarahan terhadap setiap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga hal ini bertujuan agar setiap lembaga yang ada dapat bekerja secara optimal sehingga bentuk pembangunan tidak saja di pikul oleh pemerintah kepenghuluan tapi juga oleh masyarakat.

Sehubungan dengan proses pemberian pengarahan berdasarkan temuan dilapangan Penghulu Pekaitan telah melakukan wawancara dengan pihak Kepenghuluan diperoleh informasi bahwa pemerintahan kepenghuluan telah memberikan pengarahan berupa arahan, petunjuk pemberian langkah-langkah, terhadap berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti, Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada di Kepenghuluan Pekaitan kemudian untuk mengetahui tanggapan responden yang mengelola lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Kepenghuluan Pekaitan apakah mereka mendapat pengarahan dari Penghulu Pekaitan jawaban mereka dapat dilihat seperti tabel berikut :

Tabel V.6. Tanggapan Responden Tentang Pemberian Pengarahan.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Pemberian Arahan	3 (12%)	18 (69%)	5 (19%)	26 (100%)
2	Pemberian Petunjuk	8 (31%)	4 (42%)	7 (27%)	26 (100%)
3	Pemberian Langkah-langkah	7 (27%)	15 (58%)	4 (15%)	26 (100%)
Jumlah		18	44	16	78
Rata-rata		8	12	6	26
Persentase		31%	46%	23%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 8 orang atau (31%) dikategorikan berperan. Dari 8 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberikan pengarahan pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam bekerja, seperti dalam penyusunan jumlah penduduk serta juga memberi petunjuk dan langkah-langkah pada mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Selanjutnya dari 8 orang responden yang terkategori berperan tersebut sebanyak 3 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberi pengarahan, petunjuk dan langkah-langkah untuk membuat program-program kerja Rukun Tetangga dan Rukun Warga. Sedangkan dari 8 responden yang terkategori berperan tersebut sebanyak 3 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasakan bahwa Penghulu Pekaitan pernah memberi mereka pengarahan dan petunjuk terutama tentang tugas mereka sebagai pimpinan masyarakat dan juga mereka diberi petunjuk, tentang menanggulangi keamanan lingkungan dan pencegahan penyakit masyarakat. Berdasarkan wawancara penulis dengan Sekdes Pekaitan Bapak Hamdani, S.Sos “*untuk saat ini pengarahan yang telah kami berikan sudah sesuai , seperti salah satunya pemberian langkah-langkah untyk melakukan*

kegiatan RT dan RW, tetapi mungkin masih ada beberapa yang tidak berjalan tetapi menurut saya ya itu sudah d beri pengarahan”(pada hari Rabu 15 September, jam 10.40 WIB).

Selanjutnya dari data tabel V.6 tersebut juga dapat diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan tentang pemberian pengarahan yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terdapat 26 responden yang mengelola berbagai lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dimana sebanyak 12 orang atau (46%), dikategorikan cukup baik, dari 12 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan dalam waktu tertentu ada memberikan pengarahan untuk melakukan suatu pekerjaan seperti penyusunan kegiatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan, pengarahan mengenai penyusunan program-program kerja dan untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas yang di kembangkan oleh Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Sementara itu dari 12 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan kadang-kadang memberikan pengarahan tentang kedudukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai pimpinan masyarakat terutama dalam menyelesaikan setiap persoalan-persoalan sosial. Dari 12 orang responden 3 orang adalah masyarakat dimana mereka juga merasa bahwa Penghulu Pekaitan kurang memberikan pengarahan.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberikan pengarahan yang

dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 6 orang atau (23%) dikategorikan kurang berperan dari 6 orang tersebut sebanyak 4 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberikan pengarahan dalam menjalankan dan melakukan suatu kegiatan seperti dalam penyusunan perencanaan pembangunan, kemudian sebanyak 6 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberikan pengarahan untuk membuat dan menyusun program-program kerja yang dilakukan setiap tahunnya untuk lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Sementara itu dari 6 orang responden yang terkategori kurang berperan sebanyak 2 orang adalah Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan tidak pernah memberi pengarahan tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan di tengah masyarakat.

Dari analisa data tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian pengarahan terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat di kategorikan “cukup berperan” ada pada persentase 34%-66%”.

10. Memberi intruksi-intruksi

Pembangunan kepenghuluan harus dilaksanakan secara terarah, dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan Kepenghuluan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang

dimiliki oleh kepenghuluan yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi manusianya dan daya dukung alamnya. Salah satu kegiatan yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan kepenghuluan ini adalah dengan adanya peraturan yang bisa mengatur dan sebagai acuan kegiatan dari pemerintah Kepenghuluan.

Guna menjalankan setiap kegiatan yang ada serta guna meningkatkan pembangunan yang ada di Kepenghuluan maka perlu adanya peranan dari pimpinan dari kepenghuluan dalam memberikan intruksi guna memperlancar setiap pembangunan yang dilakukan dalam hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator.

- Adanya intruksi lisan
- Adanya intruksi tertulis
- Adanya perintah

Maka dari itu sesuai dengan informasi yang diperoleh di lapangan maka selanjutnya dapat dilihat tanggapan responden yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel V.7. tanggapan Responden Tentang Memberi Intruksi-intruksi.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Adanya Intruksi Lisan	10 (38%)	10 (38%)	6 (24%)	26 (100%)
2	Adanya Intruksi Tertulis	8 (31%)	11 (42%)	7 (27%)	26 (100%)
3	Adanya Perintah	9 (15%)	12 (46%)	5 (19%)	26 (100%)
Jumlah		27	33	18	78

Rata-rata	9	11	6	26
Persentase	35%	42%	23%	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dengan melihat tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ada bahwa memberi intruksi-intruksi yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 9 orang atau (35%) dikategorikan berperan, dari 9 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberikan intruksi-intruksi dalam bekerja serta juga mendorong serta menggerakkan mereka untuk bekerja sesuai dengan tugas-tugas Rukun Tetangga dan Rukun Warga, kemudian anggota Rukun Tetangga dan Rukun Warga juga merasa bahwa Prnghulu Pekaitan telah memberikan intruksi-intruksi terutama tentang pengembangan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja untuk selalu aktif membina warga. Selanjutnya 9 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 3 orang adalah masyarakat dan pengurua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan telah memberi intruksi-intruksi pada mereka untuk membuat program-program kerja yang disusun setiap tahunnya.Sementara itu dari 9 orang responden yang terkategori berperan sebanyak 2 orang adalah Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan pernah memberi intruksi-intruksi terutama tentang kedudukan mereka sebagai pimpinan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan sosial.

Dari hasil wawancara penulis dengan Penghulu Pekaitan Bapak Arif Fadillah “*kalau dalam bentuk surat sepertinya tidak ada kendala , kadang-kadang ada beberapa RT Dan RW yang tidak datang*”(pada hari Rabu 15 September, jam 11 WIB) Selanjutnya juga diketahui bahwa tanggapan dari berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa pemberian intruksi yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebanyak 11 orang atau (42%) dikategorikan cukup berperan dari 11 orang tersebut sebanyak 3 orang adalah pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kadang-kadang dalam waktu tertentu ada memberi intruksi-intruksi dalam melakukan suatu pekerjaan seperti dalam penyusunan suatu kebijakan kepenghuluan.

Selanjutnya dari 11 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 3 orang adalah masyarakat dimana mereka juga menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan kurang dalam memberi intruksi-intruksi kepada lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk membuat program-program kerja, setiap bulannya bahwa program kerja tahunan.Sementara itu dari 11 orang responden yang terkategori cukup berperan sebanyak 2 orang adalah ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka merasa bahwa Penghulu Pekaitan sangat jarang dan hampir tidak pernah memberi intruksi-intruksi terutama tentang kedudukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagai pimpinan masyarakat.

Dari tanggapan berbagai responden lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ada bahwa memberi intruksi-intruksi yang dilakukan oleh Penghulu Pekaitan terhadap 26 responden yang mengelola berbagai lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dimana mereka menyatakan bahwa Penghulu Pekaitan tidak ada memberi intruksi-intruksi pada mereka dalam menjalankan tugasnya, kemudian mereka juga merasa Penghulu Pekaitn tidak pernah memberi intruksi-intruksi mengenai kegiatan organisasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga, penyusunan program-program kerja.

Dari analisa data tabel V.7 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam memberi intruksi-intruksi terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan dapat dikategorikan “kurang berperan ” atau pad persentase 1 %-33%.

Dari lima indikator mengenai Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.Selanjutnya dari analisa yang telah dibuat diatas maka dapat di tarik rekapitulasi dari jawaban responden tersebut yang untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel V.8. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Peranan Penghulu dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir.

No	Sub Indikator	Kategori Pengukuran			Jumlah
		Berperan	Cukup Berperan	Kurang Berperan	
1	Pemberian petunjuk	4 (15%)	16 (61)	6 (23%)	26 (100%)
2	Pemberian pendidikan	6	15	5	26

	dan latihan	(23%)	(58%)	(19%)	(100%)
3	Pemberian bimbingan	5 (19%)	17 (65%)	4 (16%)	26 (100%)
4	Pemberian pengarahan	8 (31%)	12 (46%)	6 (23%)	26 (100%)
5	Memberikan intruksi- intruksi	9 (35%)	11 (42%)	6 (23%)	26 (100%)
Jumlah		32	71	27	125
Rata-rata		7	13	6	26
Persentase		(27%)	(50%)	(23%)	100%

Sumber :Data Olahan 2018

Dengan melihat tabel rekapitulasi jawaban responden diatas mengenai “Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir” maka dapat di kategorikan Cukup Berperan. Hal ini dapat terlihat dari tanggapan responden yang ada dari 26 responden maka yang terkategori berperan ada sebanyak 7 responden dan atau 27%, yang terkategori cukup berperan ada sebanyak 13 responden atau 50% dan yang terkategori kurang berperan ada sebanyak 6 orang atau 23%. Dengan kata lain sesuai dengan teknik pengukuran yang telah dibuat ternyata 50 % berada pada interval 34%-66% dengan kategori cukup berperan.

Menyikapi hasil rekapitulasi dari pemerintahan kepenghuluan lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan masyarakat ini, berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan mengenai Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan belum berperan secara maksimal karena dilapangan masih banyak

dijumpai program pembinaan yang belum dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Penghulu.

C. Faktor-Faktor Penghambat Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir

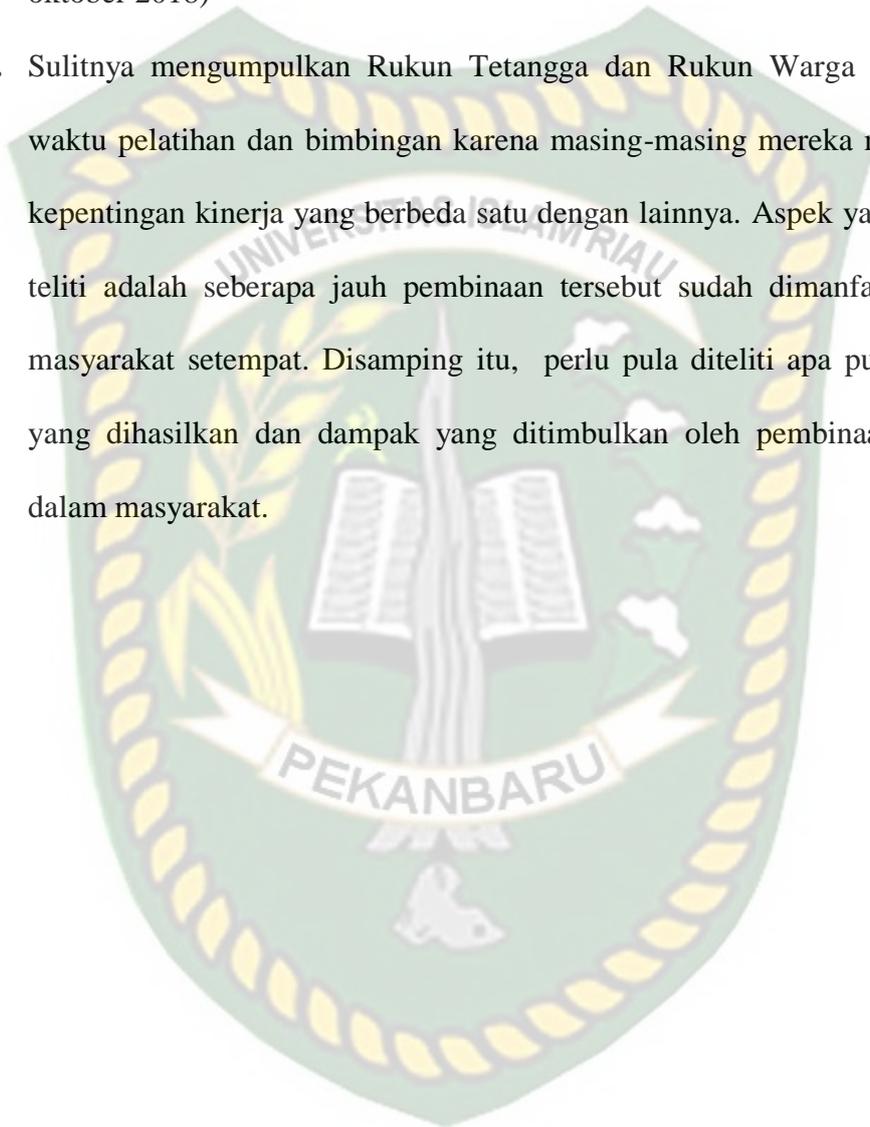
Walaupun secara fisik Pembinaan penghulu terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini berjalan cukup layak, namun demikian pembinaannya masih banyak terdapat kelemahan dan kendala yang terdapat pada pemerintah kepenghuluan oleh seorang Penghulu sebagai aparat yang diberi tugas dan fungsi dalam membina kelembagaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga ini.

Dalam menjalankan fungsinya ini banyak hambatan yang dihadapi oleh Penghulu terutama dalam melakukan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang antara lain yaitu :

- a. Dalam pembinaan kelembagaan rukun tetangga dan rukun warga, pemberian bimbingan kurang terjadi dengan baik antara lembaga kemasyarakatan dengan pemerintah kepenghuluan bersama Penghulu dalam membina lembaga kemasyarakatan rukun tetangga dan rukun warga, sampai saat ini penghulu kurang menjalankan tugas dan fungsinya terhadap pemberian bimbingan, seperti bimbingan mengenai penyusunan program-program kerja juga menggiring Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selalu aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan karena kurangnya sumber daya manusia yang ada di kepenghuluan.
- b. Kurang tersedianya dana khusus untuk membeli dan membuat buku petunjuk bagi lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Padahal buku pedoman ini sangat penting untuk menunjang kinerja lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam menjalankan tugasnya (hasil wawancara dengan sekretaris kepenghuluan tanggal 25 oktober 2018)

- c. Sulitnya mengumpulkan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pada suatu waktu pelatihan dan bimbingan karena masing-masing mereka mempunyai kepentingan kinerja yang berbeda satu dengan lainnya. Aspek yang perlu diteliti adalah seberapa jauh pembinaan tersebut sudah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat. Disamping itu, perlu pula diteliti apa pula manfaat yang dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan oleh pembinaan tersebut dalam masyarakat.



BAB VI

PENUTUP

A. kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peranan Penghulu Dalam Membina Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kepenghuluan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan 5 indikator yaitu :
 1. Pemberian petunjuk : mempunyai tiga item pertanyaan, dari tiga item pertanyaan tersebut telah mendapatkan presentase rentang nilai 61% dengan kategori cukup berperan.
 2. Pemberian pendidikan dan pelatihan : mempunyai tiga item pertanyaan, dari tiga item pertanyaan tersebut telah mendapatakan presentase rentang nilai 58% dengan kategori cukup berperan.
 3. Pemberian bimbingan : mempunyai tiga item pertanyaan, dari tiga item pertanyaan tersebut telah mendapatkan presentase rentang nilai 65% dengan kategori cukup berperan.
 4. Pemberian pengarahan : mempunyai tiga item pertanyaan, dari tiga pertanyaan tersebut telah mendapatkan presentase rentang nilai 46% dengan kategori cukup berperan.
 5. Memberikan intruksi-intruksi : mempunyai tiga item pertanyaan, dari tiga item pertanyaan tersebut telah mendapatkan presentase rentang nilai 42% dengan kategori cukup berperan.

Adapun saran yang dapat penulis berikan, antara lain :

1. Dalam menjalankan lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga pemberian bimbingan kurang berjalan dengan baik sehingga kurang menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya, menurut saya sebaiknya penghulu harus memberikan bimbingan langsung kepada lembaga kemasyarakatan tentang bimbingan mengenai penyusunan program-program kerja juga menggiring Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk selalu aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
2. Dalam lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga masih kurangnya buku petunjuk jadi, sebaiknya Penghulu menyediakan buku petunjuk untuk lembaga kemasyarakatan Rukun Warga dan Rukun Tetangga sebagai pedoman untuk menunjang kinerja lembaga kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
3. Menurut peneliti, alangkah baiknya bila pertemuan antara Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di buat jadwalnya misalkan, dalam satu bulan 2 atau 3 kali di adakan pertemuan sehingga penghulu mudah untuk memberikan pembinaan sehingga, dapat mengetahui apa manfaat yang dapat dihasilkan dan dampak yang dapat ditimbulkan oleh pembinaan tersebut dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal, 2012. *Kebijakan Publik*, Edisi Kedua Jakarta. Salemba Humanika.
- Ali, Zaini, 2015, *Teori Kebijakan Publik*, Pekanbaru. Zanafa Publishing
- Ali, Eko Maulana, 2013. *Kepemimpinan Integrative Dalam Konteks Good Governance*. Jakarta, PT. Multicerdas Publishing.
- Djogo, Dkk. 2003. *Memahami Kelembagaan dan Organisasi*. Bandung, Pustaka Mahardika.
- Effendi, Khasan, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung, CV. Indra Prahasta
- Ermayana, M istera. 1994 . *Ilmu Pemerintahan Suatu Pengantar*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Musanef, 1999. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta, PT. Gunung Agung.
- Ndraha, talidizuhu, 2005. *Kybernology (ilmu pemerintahan baru) 1*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Rauf, Rahyunir, 2005. *Rukun Tetangga dan Rukun Warga*. Pekanbaru.
- Rauf, Rahyunur, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di indonesia*. Pekanbaru, Zanafa.
- Santoso, 1995. *Pembinaan dalam Organisasi*. Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Santoso, 2001. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Aditama.
- Stephan P. Robbins, 1994. *Memahami Kelembagaan dan Organisasi*. Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana, 2007. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung, Sumber Sari Indah.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar.*, Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, soerjono, 2012. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta, Raja Grando Persada.
- Thoha, Miftah, 1997. *Pembinaan Organisasi*. Jakarta, pt. Raja Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 2002. *Pembinaan yang Efektif*. Jakarta, Rajawali.
- Usman, Akbar, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial*. jakarta, Prestasi Pustaka.

Wasistiono, Sadu, dan Irwan Tahir, 2006, *Prospek Pengembangan Desa*. Jatinagor: Fokus Media.

Zulkifli DKK, 2013. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Pekanbaru, Fisipol UIR

Undang-Undang

Undang-undang Dasar Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Tentang Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 94 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Rokan Hilir Nomor 39 Tahun 2002 Tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja pemerintahan Kependhuluan

